PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
I N S P E K T O R A T
Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 23 Maret 2025

Plt. Inspektur

ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Biro Umum. LKjIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP sebagai salah satu alat penilai keberhasilan/kegagalan kinerja merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, LKjIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (feedback) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih tinggi lagi.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Biro Umum berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) peningkatan kinerja dan kelancaran kegiatan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran tersebut diantaranya diselenggarakan melalui pelayanan dibidang kerumahtanggaan, seperti pelayanan pemakaian / peminjaman fasilitas kedinasan, seperti penyediaan kendaraan dinas, faslitasi kunjungan tamu, pemakaian ruang pertemuan, pelayanan acara/upacara. Di bidang administrasi keuangan dan asset disediakan pelayanan seperti pelayanan administrasi keuangan setda, penatausahaan asset biro umum dan pelayanan pemeliharaan dan rehabilitasi asset. Di bidang ketatausahaan meliputi pelayanan pelayanan surat masuk, administrasi kepegawaian dan pengelolaan perencanaan dan penganggaran serta pengadaan sarana dan prasarana.

Demikian LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.

Padang, Januari 2025
Kepala Biro Umum,

Ir. Edi Dharma, M.Si.
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19680513 199403 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			I
DAFTAR ISI			II
DAFTAR TABEL			III
DAFTAR GRAFIK			V
RINGKASAN EKSEKUTIF			VI
DAFTAR LAMPIRAN			VIII
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1.	Gambaran Umum Organisasi	1
	1.2.	Aspek Strategis Organisasi	7
	1.3.	Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang Dihadapi Organisasi	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA		12
	2. 1	Tujuan dan Sasaran OPD	12
	2. 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		26
	3. 1	Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	26
	3. 2	Hasil Pengukuran Kinerja	27
	3. 3	Capaian Kinerja Organisasi	27
BAB IV	PENUTUP		91
LAMPIRAN			IX

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Jumlah SDM (PNS) Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 1.4.2	Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kepegawaian	5
Tabel 1.4.3	Jumlah SDM (PNS) Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4.4	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pada Biro Umum	6
Tabel 2.1.1.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026	15
Tabel 2.1.2.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	16
Tabel 2.1.2.2	Keterkaitan Antara Misi, Tujuan Dan Sasaran Kepala Daerah Pada Rpjmd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Dengan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	17
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 2.2.2	Program/Kegiatan Dan Anggaran Perjanjian Kinerja Biro Umum TA 2024	21
Tabel 3.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2.1	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2024	27
Tabel 3.3.1.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024	28
Tabel 3.3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1	29
Tabel 3.3.1.3	Nilai Komponen Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	33
Tabel 3.3.1.4	Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2024 Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026	34
Tabel 3.3.1.5	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah	41

DAFTAR TABEL

	Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	
Tabel 3.3.1.6	Capaian Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	44
Tabel 3.3.1.7	Realisasi Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024 Per Komponen	46
Tabel 3.3.1.8	Target Dan Realisasi Kinerja Pada Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026	47
Tabel 3.3.1.9	Perbandingan Realisasi Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Dengan Standar Provinsi Lain	48
Tabel 3.3.1.10	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	54
Tabel 3.3.1.11	Capaian Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	55
Tabel 3.3.1.12	Realisasi Ikm Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024 Per Komponen	57
Tabel 3.3.1.13	Target Dan Realisasi Kinerja Pada Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Pimpinan Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026	58
Tabel 3.3.1.14	Perbandingan Realisasi Ikm Pelayanan Pimpinan Dengan Standar Provinsi Lain	59
Tabel 3.3.1.15	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Pimpinan	64
Tabel 3.3.2.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024	66
Tabel 3.3.2.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1	67
Tabel 3.3.2.3	Nilai Komponen Tingkat Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Tahun 2021 - 2024	68
Tabel 3.3.2.4	Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat	69

DAFTAR TABEL

	Daerah Tahun 2024 Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026	
Tabel 3.3.2.5	Matrik Tindak Lanjut Perencanaan Kinerja	74
Tabel 3.3.2.6	Matrik Tindak Lanjut Pengukuran Kinerja	74
Tabel 3.3.2.7	Matrik Tindak Lanjut Pelaporan Kinerja	75
Tabel 3.3.2.8	Matrik Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	76
Tabel 3.3.2.9	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel	79
Tabel 3.3.3.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024	81
Tabel 3.3.3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1	81
Tabel 3.3.3.3	Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran % Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2024 Dengan Target RPJMD / Renstra Tahun 2021 – 2026	83
Tabel 3.3.3.4	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	86
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Biro Umum Setda Prov. Sumbar	4
Grafik 2	Pohon Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	23
Grafik 3	Capaian Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Per Indikator Tahun 2024	31
Grafik 4	Realisasi Sasaran Strategis 1.1 Biro Umum Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024	32
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Dengan Standar Provinsi Lain	35
Grafik 6	Capaian Ikm Pelayanan Tamu Kdh/Wkdh Per Komponen Penilaian	45
Grafik 7	Realisasi Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024	45
Grafik 8	Perbandingan Realisasi Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Dengan Standar Provinsi Lain	48
Grafik 9	Capaian Ikm Pelayanan Pimpinan Per Komponen Penilaian	55
Grafik 10	Realisasi Ikm Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024	55
Grafik 11	Perbandingan Realisasi Ikm Pelayanan Pimpinan Dengan Standar Provinsi Lain	58
Grafik 12	Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2024	66
Grafik 13	Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Selama Tahun 2021 S.D Tahun 2024	67
Grafik 14	Perbandingan Realisasi Dengan Standar Provinsi Lain	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 15	Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Selama Tahun 2021 S.D Tahun 2024	81
Grafik 16	Perkembangan Realisasi Belanja Dibandingkan Target Penyerapan Tahun 2024	86
Grafik 17	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dan Tahun 2023	88

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Renstra Biro Umum Tahun 2021-2026, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya mewujudkan tujuan strategis yang direncanakan yaitu ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dan Tujuan generik ”Meningkatnya Kinerja Organisasi”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Biro Umum merumuskan sasaran strategis pertama, Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu dan Pimpinan, sasaran kedua Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan sasaran strategis ketiga Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi. Dengan sasaran tersebut, Biro Umum fokus kepada 3 (tiga) strategi antara lain: meningkatkan kinerja pelayanan tamu, pimpinan dan administrasi keuangan setda, mengoptimalkan kinerja pelayanan internal, pengelolaan perencanaan dan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Biro Umum berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) peningkatan kinerja dan kelancaran kegiatan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran tersebut diantaranya diselenggarakan melalui pelayanan dibidang kerumahtanggaan, seperti pelayanan pemakaian/peminjaman fasilitas kedinasan, seperti penyediaan kendaraan dinas, faslitasi kunjungan tamu, pemakaian ruang pertemuan. Di bidang ketatausahaan disediakan pelayanan kesekretariatan seperti pelayanan surat masuk, administrasi kepegawaian dan pengelolaan perencanaan dan penganggaran, serta pelayanan sarana dan prasarana setda seperti pengadaan sarpras.. Di bidang keuangan setda merupakan pelayanan sarana dan prasarana setda seperti pemeliharaan sarpras dan pengelolaan administrasi asset SKPD, pelayanan keuangan Sekretariat Daerah seperti layanan penerbitan SPM dan verifikasi SPj.

Pada Tahun 2024, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Bab II Perencanaan Kinerja, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur dan menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Biro Umum.

Guna menyempurnakan SAKIP dilakukanlah revisi terhadap Pohon Kinerja (Cascading) Biro Umum untuk menyelaraskan dan mempertajam hubungan keterkaitan Tujuan, Sasaran dan indikatornya masing-masing.

Adapun pencapaian Sasaran Strategis Biro Umum Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.

- Indikator Kinerja : IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH. Target Sangat Baik, realisasi mencapai 91,54 (sangat baik), persentase capaian 100,01% “Sangat Baik”.
- Indikator Kinerja : IKM Pelayanan Pimpinan. Target Sangat Baik, realisasi mencapai 90,18 (sangat baik), persentase capaian 100,03% “Sangat Baik”
- Indikator Kinerja : IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda. Target Sangat Baik, realisasi mencapai 90,01 (sangat baik), persentase capaian 100,29% “Sangat Baik”

2. Sasaran strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi .
   - Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Target ditetapkan BB (73,20), realisasi BB (73,38), persentase capaian 100,25% “Sangat Baik
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi
   - Indikator Kinerja : % realisasi penerimaan retribusi. Target ditetapkan 95%, realisasi 94,83%, persentase capaian 99,82% “Cukup”.

Dengan demikian, pencapaian rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran strategis Biro Umum Tahun 2024 sebesar 100,08% dengan predikat kinerja “Sangat Baik”.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Esselon II

Lampiran 2 Formulir Pengukuran Kinerja

BAB I
Pendahuluan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LKj Biro Umum Tahun 2024 ini disusun dengan maksud memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Umum, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Biro Umum selama satu periode. Selain itu, juga sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Biro Umum untuk meningkatkan kinerjanya kedepan.

1.1. Gambaran Organisasi

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Umum berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan Tugas pokok Biro Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah “membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Umum melaksanakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha; dan
3. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Bagian Tata Usaha

   Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;

   Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

   a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
   c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset

   Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam; dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Struktur Organisasi

GRAFIK 1

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR

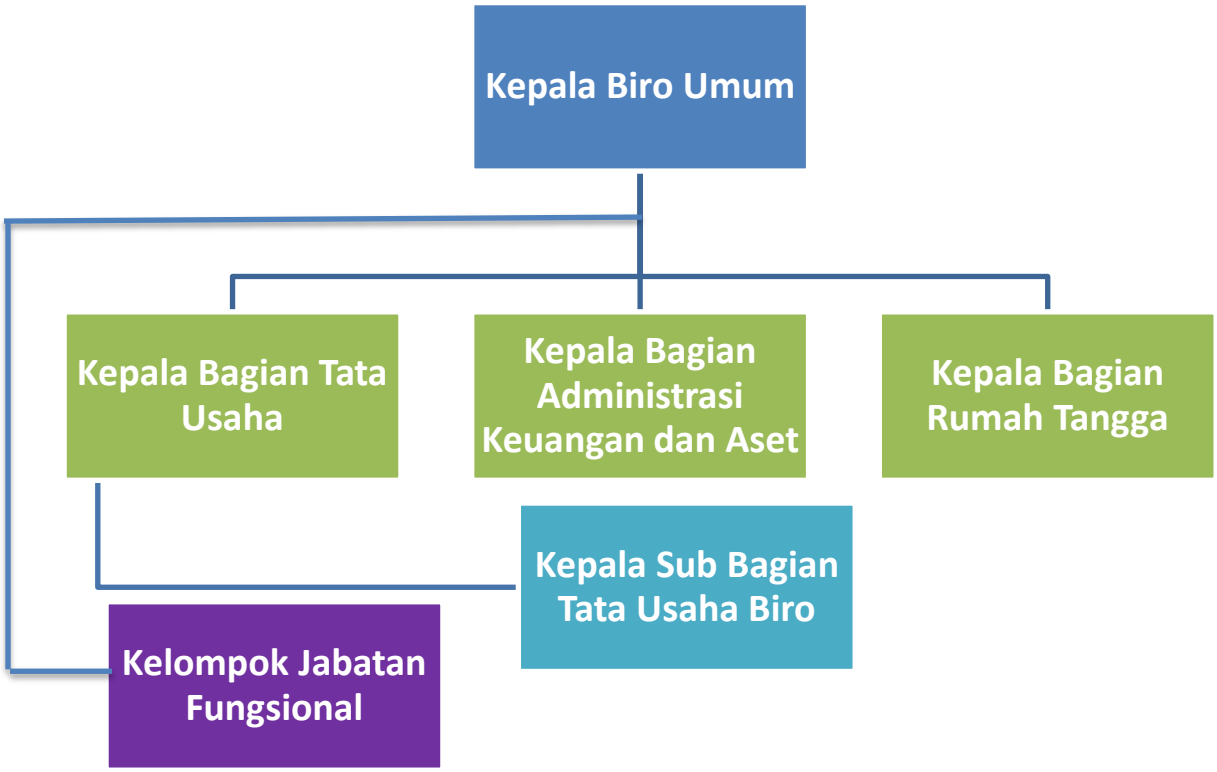

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Biro Umum didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 197 dengan rincian 62 orang ASN, 4 orang PTT dan 131 orang non ASN orang seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Sebagai supporting unit tentu diperlukan SDM yang berkompetensi dan memiliki skil tertentu dalam menjalankan tugas-tugas Biro Umum. Biro Umum saat ini memiliki persentase pegawai ASN dengan jenjang pendidikan D3 ke atas sebesar 53,23 persen (33 orang) dari total pegawai Biro Umum. Komposisi pegawai Biro Umum dapat disajikan pada tabel-tabel berikut :

TABEL 1.4.1

JUMLAH SDM (PNS) BERDASARKAN PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	11 Orang
3	S1	19 Orang
4	D3	3 Orang
5	SMA	28 Orang
6	SMP	1 Orang
7	SD	-

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum 2024

TABEL 1.4.2

JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KEPEGAWAIAN

No.	Jenis	Jumlah
1	PNS	62 Orang
2	CPNS	-
3	PTT	4 Orang
4	Tenaga Kontrak	131 Orang

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum Tahun 2024

TABEL 1.4.3

JUMLAH SDM (PNS) BERDASARKAN GOLONGAN

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	7 Orang
2	III	37 Orang
3	II	21 Orang
4	I	-

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum Tahun 2024

SARANA DAN PRASARANA

Secara umum kondisi eksisting sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

TABEL 1.4.4

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PADA BIRO UMUM

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi
1	Alat-alat Besar	63	Baik : 45 Rusak Berat : 18
2	Alat-alat Angkutan	139	Baik : 130 Rusak Berat : 9
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	17	Baik : 16 Rusak Berat : 1
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3886	Baik : 3378 Rusak Berat : 508
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	332	Baik : 302 Rusak Berat : 30
6	Alat-alat Kedokteran	22	Baik : 15 Rusak Berat : 7
7	Bangunan Gedung	29	Baik
8	Monumen	1	Baik
9	Buku Perpustakaan	614	Baik
10	Barang Bercorak Kebudayaan	58	Baik : 56 Rusak Berat : 2

Sumber : Buku Inventaris Biro Umum Tahun 2024

KEUANGAN

Anggaran untuk menunjang program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2024 bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2024 ini berjumlah Rp.140.576.048.296 setelah perubahan. Dengan Total Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, KDH/WKDH dan

Belanja Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.62.527185.559 dan Belanja Penunjang Urusan Lainnya sebesar Rp.78.048.862.737.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Biro Umum secara langsung tidak terkait dengan pencapaian sasaran Kepala Daerah, namun Biro Umum hanya sebagi unit supporting atau penunjang urusan pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha dalam rangka menjamin terciptanya pelayanan yang baik bagi KDH/WKDH, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli serta pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam hal ini Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Potensi Strategis antara lain :

1. Menguatkan peran Biro Umum dalam hal pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli dengan memastikan : 1) SDM Aparatur yang melayani memiliki kemampuan optimal ; 2) Sarana dan prasaran penujang pelayanan harus terus diperbaharui dengan pengadaan atau pemeliharaan ; 3) rentang waktu pelaksanaan pelayanan dapat dipercepat dan tetap optimal.
2. Dalam hal pelayanan administrasi keuangan Setda, Biro Umum juga harus memastikan : 1) SDM Aparatur yang mampu mengoperasikan sistim informasi dan memahami peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan keuangan ; 2) pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
3. Dalam pelayanan internal, Biro Umum melaksanakan di Bidang Ketatausahaan yaitu meliputi fasilitasi perencanaan, kepegwaian, surat menyurat dan pengadaan barang dan jasa.

1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Sedang Dihadapi Organisasi

Permasalahan utama dari Biro Umum sebagai penunjang urusan pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini, dan Biro Umum termasuk salah satu unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan yaitu pelayanan tamu Rumah tangga KDH/WKDH, pelayanan kepada pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda, namun saat ini kendala yang terjadi adalah kurangnya kuantitas SDM dan sarana prasarana penunjang pelayanan tersebut.
2. Selain pelayanan public, Biro umum juga didorong untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja organisasi dan juga pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah

Mencermati permasalahan dan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan beberapa Langkah-langkah yang terkait, antara lain:

1. Biro Umum memiliki peran yang strategis dalam memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pimpinan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan cara mengoptimalkan SDM dan sarana dan prasarana yang ada ditambah dengan merekrut tenaga kontrak dalam memperlancar tugas dan fungsi pelayanan.
2. Sejalan dengan misi Gubernur Sumatera Barat pada periode RPJMD ke-IV (2021-2026) Biro Umum salah satu OPD yang mengampu pada Misi ke 7 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan tujuan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani pada sasaran ke tiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan public, maka Biro Umum memiliki peran strategis sebagai yang terdepan dalam:
   a. Terdepan dalam memberikan pelayanan kepada tamu Rumah tangga Pimpinan, pelayanan kepada pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda. Untuk itu perlu menyikapinya dengan melakukan penguatan kapasitas SDM Biro Umum, sarana dan prasarana.

b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum BB
c. Salah satu OPD yang memiliki target pendapatan dalam bidang penerimaan retribusi daerah pemakaian kekayaan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan Biro Umum, utamanya fasilitas pada beberapa gedung / aset yang dikelola serta sarana dan prasarana untuk kebutuhan Pimpinan.
2. Meningkatkan daya dukung personil melalui rekruitmen tenaga khusus yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan Biro Umum.
3. Meningkatkan dukungan teknologi pada pelayanan Biro Umum sispensu, sipintas, dan lain-lain.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Biro Umum pada 5 (lima) layanan unggulan Biro Umum, yaitu Pelayanan Ruang Pertemuan, Pelayanan Tamu / Pimpinan, Pelayanan Peminjaman Kendaraan dan Fasilitas Kedinasan, Pelayanan Penerimaan dan Pendistribusian Surat, dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda.

BAB II
Perencanaan Kinerja

2. 1 Tujuan dan Sasaran Biro Umum

2.1.1 Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**.

Dalam misi RPJMD tersebut Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. **Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.**
2. Meningkatnya kapabalitas birokrasi.
3. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berada pada sasaran 1 yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, serta sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik

Melalui sasaran 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dengan indicator nilai akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah kewenangan perangkat daerah dengan indicator persentase realisasi PAD

Melalui sasaran 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indicator tujuan IKM Pelayanan Publik Biro Umum

Melalui tujuan ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik dan komprehensif kepada Tamu KDH/WKDH, pelayanan pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang dicapai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan pimpinan dan tamu pemerintah daerah serta pelayanan administrasi keuangan secretariat daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
3. Meningkatnya pencapaian target retribusi

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1.1.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Pelayanan Publik Biro Umum	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40
			IKM Pelayanan Pimpinan	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40
			IKM Pelayanan Administrasi Keuangan setda	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi PAD	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Sumber : Renstra Biro Umum tahun 2021 - 2026

2.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Umum dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Renstra Biro Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat melalui tabel berikut :

TABEL 2.1.2.1

Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

MISI KE – 7 RPJMD 2021 – 2026 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
TUJUAN RPJMD 2021 – 2026 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani				
SASARAN RPJMD 2021 – 2026 : Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel				
Tujuan dan Sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah :				
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM organisasi
			Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
			Meningkatkan Pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	Meningkatkan kualitas SDM yang melayani	Peningkatan kemampuan SDM melalui keikutsertaan Pelatihan / bimtek
			Meningkatkan promosi target retribusi Biro Umum	Mengoptimalkan promosi melalui media social
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang	Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa
SASARAN RPJMD 2021 – 2026 Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
Tujuan dan Sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah :				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung	Meningkatkan kecukupan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan
				Menjaga kualitas kondisi sarana dan prasarana yang baik
				Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok atau kegiatan
		IKM Pelayanan Pimpinan	Meningkatkan kinerja pelayanan pimpinan dan tamu rumah tangga KDH/WKDH	Meningkatkan kemampuan SDM pelayanan pimpinan dan tamu Rumah Tangga KDH/WKDH
			Mengoptimalkan kinerja pengelolaan gedung/rumah	Penanganan keluhan pengguna gedung/rumah jabatan yang cepat dan handal
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan setda	Meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis aparatur di bidang penatausahaan keuangan	Peningkatan kemampuan SDM melalui keikutsertaan Pelatihan / bimtek

2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja diatur menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam merencanakan perjanjian kinerja, agar terukur dan dapat pula mencapai tujuan organisasi, maka indikator yang dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja, dijabarkan dari Sasaran Strategis yang telah sesuai (sinkron) dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Biro Umum.

Pada Tahun 2024, Biro Umum memiliki 5 (Lima) indikator kinerja dima 3 (tiga) diantaranya ditetapkan menjadi IKU. Indikator tersebut merupakan alat ukur tercapainya 3 (Tiga) Sasaran Strategis Biro Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Umum 2021-2026.

Agar perencanaan kinerja organisasi semakin baik perlu dilakukan pembenahan terhadap manajemen kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun perjanjian kinerja pejabat secara hierarkis atau leveling, mulai dari Kepala SKPD pada level Eselon II, Kepala Bagian pada level Eselon III, dan Kepala Sub Bagian pada level Eselon IV, Kelompok Jabatan Fungsional serta masing-masing Staf Pelaksana pada level terendah. Penyusunan struktur kinerja bertingkat ini mestilah selaras dan tersambung antar level dan indikator yang ditetapkan juga mesti memenuhi kriteria SMART.

Selanjutnya penyusunan indikator kinerja pada masing-masing level juga memperhatikan ketersediaan basis data, mekanisme pengumpulan data dan pengolahan data yang tervalidasi atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan penilaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi capaian dengan target indikator kinerja, menunjukan tingkat pencapaian kinerja. Namun pada penilaian LKj secara keseluruhan, perencanaan kinerja yang sesuai kriteria menjadi porsi penilaian yang cukup besar. Oleh karenyanya penting sekali untuk menyusun perencanaan kinerja yang memenuhi kriteria SMART.

TABEL 2.2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	91,53 (Sangat Baik)
	IKM Pelayanan Pimpinan	90,15 (Sangat Baik)
	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	89,75 (Sangat Baik)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	73,20 (BB)
Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Total anggaran Perjanjian Kinerja 2024 ini berasal dari anggaran Belanja Biro Umum TA. 2024 sebesar Rp.140.576.048.296

Dengan demikian, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran yang digunakan pada pengukuran Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 berikut ini :

TABEL 2.2.2

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TA 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik	• Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.083.052.148

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah • Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	BB	• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.460.631.614
Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%	• Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	32.364.561
JUMLAH				**140.576.048.296**

Sumber : DPA Perubahan Biro Umum Tahun 2024

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

3.1 Motodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebagaimana yang tertera pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Capaian = \frac{(2\ x\ Target) - Realisasi}{Target} \times 100$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangak Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berikut disajikan rekapitulasi hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2024.

TABEL 3.2.1
REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN
PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (91,53)	Sangat Baik (91,54)	100,01	Sangat Tinggi
		IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (90.15)	Sangat Baik (90,18)	100,03	Sangat Tinggi
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (89,75)	Sangat Baik (90,01)	100,29	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (73,20)	BB (73,38)	100,25	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%	94,83%	99,82	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan					**100.08**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Dari Tabel 3.2.1 di atas, dapat dilihat capaian kinerja rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran strategis Biro Umum

Tahun 2024 adalah sebesar 100.08%. Dengan demikian hasil capaian kinerja lebih besar dari target yang ditetapkan termasuk klasifikasi berhasil dengan predikat ***Sangat Tinggi***.

3.3 Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Biro Umum Tahun 2024 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini akan disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis

3. 3.1 Tujuan 1 :"*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*".

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan "Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintah Dengan Aparatur Yang Melayani". Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan". Indeks persepsi kualitas layanan publik menunjukkan sejauh mana persepsi masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survei kepuasan

masyarakat pada unit pelayanan publik yang melaksanakan survei pada tahun-n.

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik langsung, disebut Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat ada 75 unit UKPP yang berada dalam naungan 25 Organisasi Perangkat Daerah dan salah satunya adalah Biro Umum.

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja adalah Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Biro Umum ditargetkan 90,48 pada tahun 2024. Penetapan target ini berpedoman dari realisasi Tingkat kualitas pelayanan public tahun sebelumnya.

Tujuan pertama Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui satu indicator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Biro Umum. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indicator kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.1

Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pelayanan Publik Biro Umum	90,48	90.58	100.11	90,40	100.19

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Dilihat dari realisasi indicator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan pertama telah dicapai dengan sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100,11%. Jika dilihat pada target akhir

Renstra, maka target tersebut telah tercapai sebesar 100,19%. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1.1	**Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda**

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja adalah Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Biro Umum ditargetkan 90,48 pada tahun 2024. Penetapan target ini berpedoman dari realisasi Tingkat kualitas pelayanan public tahun sebelumnya

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Pengukuran capaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah dilakukan melalui 3 (tiga) indicator kinerja yaitu 1) IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH ; 2) IKM Pelayanan Pimpinan, dan ; 3) IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda. Berdasarkan hasil pengolahan data questioner terhadap indicator yang telah ditetapkan Biro Umum memperoleh nilai sebesar 90,54 dari target 90.48 atau dengan capaian 100,08%, seperti yang tergambar dalam table berikut :

TABEL 3.3.1.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1.1

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (91,53)	Sangat Baik (91,54)	100,01	Sangat Tinggi
2.	IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (90.15)	Sangat Baik (90,18)	100,03	Sangat Tinggi
3.	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (89,75)	Sangat Baik (90,01)	100,29	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja		Sangat Baik (90,48	Sangat Baik (90,58)	100,11	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Nilai IKM didapat dari penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan tamu ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pelaksanaan kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap Perencanaan (desain survei)

   Survei bertujuan untuk mendapatkan jawaban (variabel deskriptif) dari pertanyaan: "*seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan tamu Rumah Tangga KDH/WKDH? ; seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan pimpinan, dan ; seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan administrasi keuangan setda*".

   Ada 9 unsur survei yang dijadikan pertanyaan survei yaitu :

   a) Persyaratan
   b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
   c) Waktu Pelayanan
   d) Biaya / Tarif
   e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
   f) Kompetensi Pelaksana
   g) Perilaku Pelaksana
   h) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
   i) Sarana dan Prasarana

2) Tahap Persiapan

   Hal-hal yang perlu disiapkan diantaranya adalah

   a) Organisasi survei : Tim survei adalah tim survei internal Biro Umum
   b) Jadwal survei : Survei dilaksanakan pada Bulan Maret s/d Desember 2023
   c) Materi survei : Alat pengumpul data telah dipersiapkan berupa kuesioner

3) Pelaksanaan Lapangan

   Pelaksanaan survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan (sampel) di Rumah Jabatan KDH/WKDH, Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Mess Bukit Lampu.

4) Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data melalui angket/kuesioner, maka data kuantitatif perlu diolah dengan statistic deskriptif. Data dikelompokkan dan ditabulasikan agar dapat disajikan melalui tabel, grafik atau diagram.

5) Penyajian dan Analisis

Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabulasi dan grafik. Data yang telah diolah ke dalam tabulasi dijumlahklan dan selanjutnya dihitung menggunakan rumus sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Formula yang digunakan :

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{9} = 1.11$$

$$SKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$$

$$SKM\ Unit\ Pelayanan \times 25$$

Biro Umum memperoleh nilai IKM tertinggi 91,54 dari target 91,53 dan nilai IKM terendah 90,01 dari target 89,75. Berikut rincian hasil pengolahan questioner IKM pelayanan public biro umum tahun 2024 :

Grafik 2

Capaian Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah per Indikator Tahun 2024

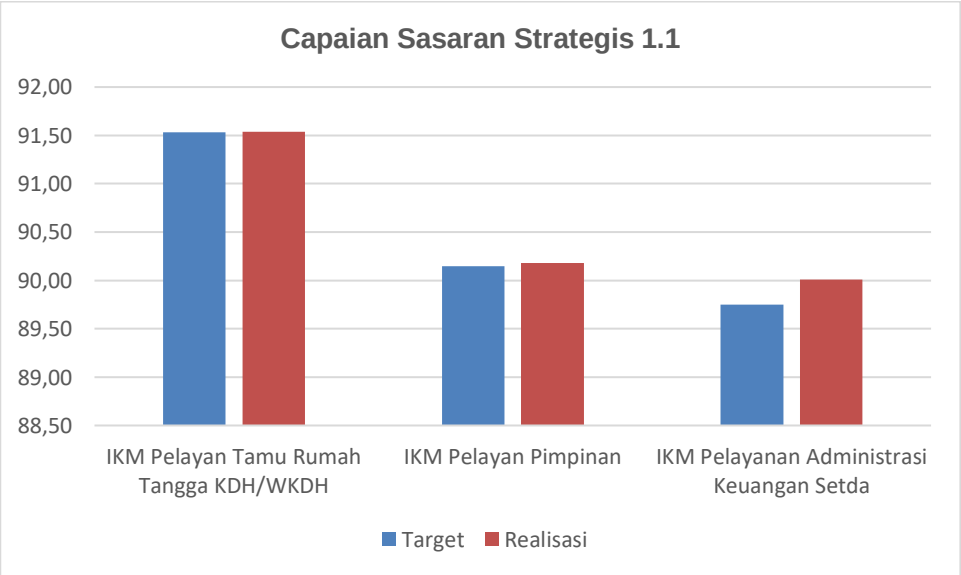

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Perbandingan dengan Realisasi Tahun sebelumnya. Dibanding dengan realisasi sebelumnya, realisasi tahun ini meningkat dari nilai 90,47 menjadi 90,58 atau meningkat 0,11 point. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Biro Umum selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

TABEL 3.3.1.3

Target dan Realisasi Sasaran Strategis I

Sasaran / Indikator	Target				Realisasi				Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda	**88,31**	**88,50**	**88,70**	**88,90**	**88,73**	**89,19**	**90,47**	**90,58**	**100,48%**	**100,78%**	**102,00%**	**101,89%**
IKM Pelayan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,31	88,50	88,70	88,90	89,90	89,38	91,52	91,54	101,80%	100,99%	103,18%	102,97%
IKM Pelayan Pimpinan	88,31	88,50	88,70	88,90	88,39	89,18	90,14	90,18	100,09%	100,77%	101,62%	101,44%
IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,31	88,50	88,70	88,90	87,90	89,02	89,75	90,01	99,54%	100,59%	101,18%	101,25%

Grafik 3

Realisasi Sasaran Strategis 1.1 Biro Umum selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024

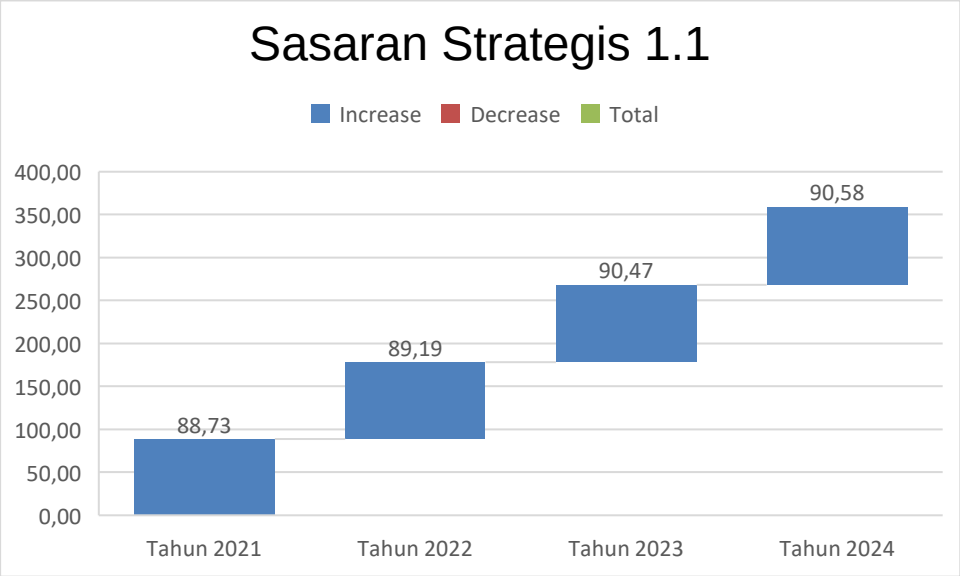

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Meskipun secara keseluruhan nilai tingkat kepuasan pelayanan pimpinan dan tamu pemerintah daerah serta pelayanan administrasi keuangan sekretariat daerah meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengolahan data questioner yang telah dilaksanakan. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan kepuasan pelayanan pimpinan dan tamu pemerintah daerah serta pelayanan administrasi keuangan sekretariat daerah tahun 2021 – 2024

Tabel 3.3.1.3
Nilai Komponen Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1.	Persyaratan	94,17	94,21	90,16	89,95
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	87,11	87,40	89,73	93,09

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
3.	Waktu Penyelesaian	85,64	85,38	89,37	88,79
4.	Biaya / Tarif	99,00	99,00	98,44	98,30
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	89,78	90,11	89,51	89,19
6.	Kompetensi Pelaksana	92,85	92,05	89,34	88,73
7.	Perilaku Pelaksana	91,10	90,90	89,59	89,23
8.	Sarana Dan Prasarana	67,96	72,60	87,29	87,74
9.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	90,98	91,08	90,81	90,18
Nilai Pengolahan Data Quesioner		88,73	89,19	90,47	90,58
Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya kualitas pelayanan public melalui indicator IKM Pelayanan Publik Biro Umum, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.1.4

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,90	91,54	100,01	90,40	101,26
		IKM Pelayanan Pimpinan	88,90	90,18	100,03	90,40	99,76
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,90	90,01	100,29	90,40	99.57
Nilai Rata-rata			88,90	90,58	100,11	90,40	100,20

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Capaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah tahun 2024 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 100,11%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah telah tercapai sebesar 100,20. Hal ini berarti Biro Umum hanya membutuhkan menjaga kualitas pelayanan dan terus ditingkatkan agar nanti tidak turun capaiannya di tahun berikutnya.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Biro Umum dalam hal ini mengambil perbandingan dengan Biro Umum Provinsi Jambi dan Biro Umum Provinsi Jawa Barat dengan pertimbangan Biro Umum Provinsi Jambi diambil sebagai perbandingan yang serata dengan Biro Umum Provinsi

Sumatera Barat dan Biro Umum Provinsi Jawa Barat dipilh karena nilai Akuntabilitas Kinerja sudan mendapat nilai A. Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan pelayanan public pada Biro Umum Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jambi, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada diatas kedua provinsi tersebut dimana Biro Umum Provinsi Jawa Barat hanya mencapai 86,92 dan Provinsi Jambi mencapai 83,11, sebagaimana yang tergambar pada grafik berikut :

Grafik 5

Perbandingan Realisasi dengan Standar Provinsi Lain

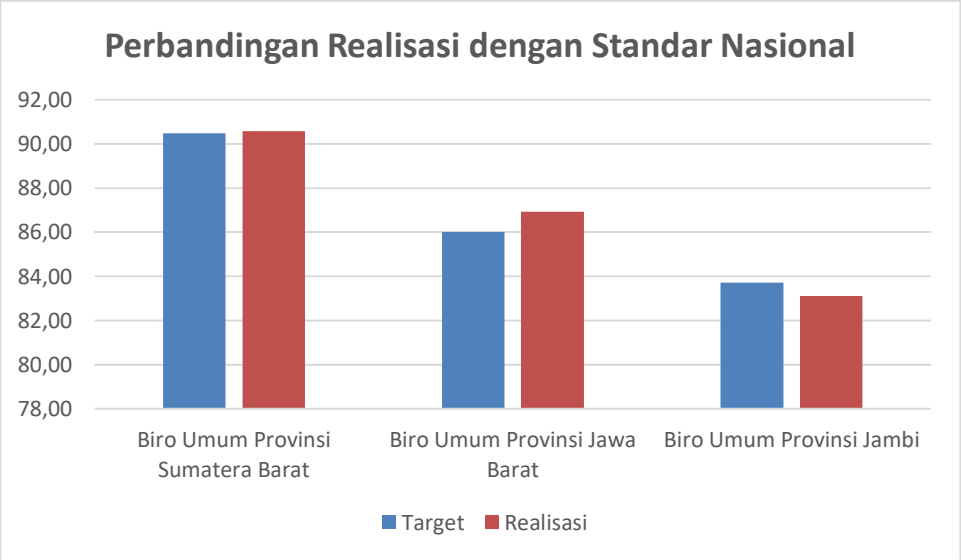

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indicator kinerja sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, diantaranya :

1) **Sistem, Mekanisme dan Prosedur** : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini

mendapat nilai 93,09 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 90,48 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah SOP yang tersosialisasi dengan baik dan mudah dimengerti.

2) **Biaya / Tarif** : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 98,30 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 90,48 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah biaya yang dibutuhkan adalah gratis dan kalaupun ada biaya biasanya digunakan untuk peminjaman fasilitas yang sesuai aturannya dikenakan tarif retribusi.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator kinerja sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah juga terdapat beberapa **factor yang penghambat** tercapainya sasaran kinerjaini, diantaranya :

1) Persyaratan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendukung Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,95 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 90,48 “Sangat Baik”. Salah satu persyaratan yang menjadi titik lemah adalah karena masih harus harus adanya disposisi pimpinan untuk mendapat pelayanan tersebut.
2) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap waktu penyelesaian dalam mendukung Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih lama hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,79 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 90,48 “Sangat Baik”. Salah satu waktu yang menjadi titik lemah adalah karena masih harus menunggu disposisi pimpinan untuk mendapat pelayanan tersebut.

3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dalam mendukung Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih kurang jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,19 dengan predikat "Sangat Baik" dimana targetnya yaitu 90,48 "Sangat Baik". Salah satu waktu yang menjadi titik lemah adalah karena item-item kecil dalam jenis / produk tidak terinci.
4) Kompetensi pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana dalam mendukung Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,73 dengan predikat "Sangat Baik" dimana targetnya yaitu 90,48 "Sangat Baik". Salah satu waktu yang menjadi titik lemah adalah karena masih banyak pelaksana yang belum dilakukan diklat.
5) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap perilaku pelaksana dalam mendukung Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,23 dengan predikat "Sangat Baik" dimana targetnya yaitu 90,48 "Sangat Baik". Salah satu waktu yang menjadi titik lemah adalah karena kurang ramahnya pelaksana di lapangan
6) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 87,74 dengan predikat "Sangat Baik" dimana targetnya yaitu 90,48 "Sangat Baik". Salah satu sarana dan prasarana yang masih menjadi titik lemah adalah fasilitas internet terutama pada unit pelayanan Biro Umum di Istana Bung Hatta Bukittinggi

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di Tahun 2024, maka Biro Umum Sekretaiat Daerah Provinsi Sumatera Barat

perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diantaranya :

1) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan.
2) Melakukan recruitment tenaga kontrak pramusaji yang akan menjadi Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah
3) Melaksanakan dan mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan tamu KDH/WKDH dalam Bimtek terkait.
4) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 80 ASN dan Non ASN Pelayanan Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai tata cara pelayanan	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional dan koordinator yaitu hanya sebanyak 25 orang atau 31,25% dari total ASN dan non ASN petugas pelayanan	• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan • Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

2. Sarana dan prasarana yang memadai

   Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan pelayanan masih sedikit memiliki permasalahan terutama fasilitas internet yang cepat.

3. Ketersediaan anggaran yang efektif

   Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 90,58% dari 90,48% dengan tingkat capaian sebesar 100,11% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.138.083.052.148 dan telah terealisasi sebesar Rp.130.272.657.550 atau sebesar 94,34%. Anggaran ini tersebar pada 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ; 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ; 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ; dan 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan yaitu 1) Fasilitasi Kunjungan Tamu ; 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ; 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ; dan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ; 2) Pengadaan Mebel ; dan 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; dan 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 6 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ; 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ; 3) Pemeliharaan Mebel ; 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ; 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ; dan 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 2) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; dan 3) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
g. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah ; 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah ; dan 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{PA x CK}) - RA}{(\text{PA})} x\ 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp.138.083.052.148
CK : Capaian Kinerja (%) = 100,11%
RA : Realisasi Anggaran = Rp.130.272.657.550

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(Rp.\ 138.083.052.148\ x\ 100{,}11\%) - 130.272.657.550}{(\text{Rp.}\ 138.083.052.148)} x\ 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0{,}06\%$$

Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%) = NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{0{,}06\%}{20} x\ 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 64{,}42\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum dengan anggaran Rp.138.083.052.148 dan realisasi sebesar Rp. 130.272.657.550 dengan capaian kinerja 100,11% mampu mendapatkan nilai efisiensi sebesar 64,42%. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah:

a) Dalam pengumpulan data questioner, terutama untuk unit pelayanan tamu di Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu questioner dikirim softcopynya ke unit kerja tersebut, dan pengumpulan datanya disampaikan melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas.
b) Sarana dan prasarana pada unit kerja pelayanan yang masih dalam kategori rusak ringan hingga sedang dilakukan pemeliharaan, sehingga terdapat efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana.
c) Sarana dan prasarana untuk jaringan internet pada Istana Bung Hatta mulai tahun 2024 menggunakan jaringan dari Diskominfotik sehingga terdapat efisiensi anggaran tagihan internet.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah :

Tabel 3.3.1.5

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	**Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan**	**IKM Pelayanan**					
			Program Penunjang Urusan		**138.083.052.148**	**130.272.657.550**	**94,34%**
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**58.888.757.104**	**54.678.118.318**	**92,85%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	**Publik Biro Umum**	**Pemerintah Daerah Provinsi**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.226.493.604	54.035.792.976	92,80%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	564.839.500	558.774.300	98,93%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	97.424.000	83.551.042	85,76%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**5.461.571.563**	**5.354.685.866**	**98,04%**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.133.800	94.133.800	100,00%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	685.796.900	678.307.150	98,91%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.066.880.270	1.052.513.340	98,65%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.058.000	33.699.256	67,32%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.564.702.593	3.496.032.320	98,07%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**15.175.449.571**	**14.327.367.623**	**94,41%**
				Pengadaan Mebel	2.330.518.436	2.165.174.300	92,91%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.844.931.135	12.162.193.323	94,68%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**19.871.459.008**	**18.623.416.584**	**93,72%**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.269.500	50.256.200	89,31%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.442.027.960	3.916.954.288	88,18%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.450.687.000	1.386.323.470	95,56%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.922.474.548	13.269.882.626	95,31%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**14.691.087.241**	**13.910.453.591**	**94,69%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.982.000	190.765.793	82,59%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.827.566.141	1.661.209.492	90,90%
				Pemeliharaan Mebel	39.375.000	29.500.000	74,92%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.191.799	165.890.705	81,64%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.950.842.301	11.505.533.921	96,27%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	439.130.000	357.553.680	81,42%
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**4.380.691.955**	**4.294.085.429**	**98,02%**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	252.244.496	245.637.970	97,38%
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000	-	0,00%
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.048.447.459	4.048.447.459	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**19.614.035.706**	**19.084.530.139**	**97,30%**
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.997.039.494	8.727.724.192	97,01%
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7.501.557.040	7.288.149.880	97,16%
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.115.439.172	3.068.656.067	98,50%

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Indikator Kinerja 1.1.1	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja adalah IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH Biro Umum ditargetkan 91,53 pada tahun 2024. Penetapan target ini berpedoman dari realisasi Tingkat kualitas pelayanan public tahun sebelumnya.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Pengukuran indicator IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH dihitung berdasarkan data olahan questioner yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indicator yang telah ditetapkan Biro Umum memperoleh nilai sebesar 91,54 dari target 91,53 atau dengan capaian 100,01%, seperti yang tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.3.1.6

Capaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (91,53)	Sangat Baik (91,54)	100,01	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Nilai IKM didapat dari penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan tamu ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Biro Umum memperoleh nilai komponen tertinggi yaitu pelayanan dilakukan secara gratis atau sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 97,39 dari target 91,53 dan nilai komponen terendah yaitu sarana dan prasarana 88,62 dari target 91,53. Berikut rincian hasil pengolahan questioner IKM pelayanan tamu rumah tangga KDH / WKDH biro umum tahun 2024 :

Grafik 5

Capaian IKM Pelayanan Tamu KDH/WKDH Per Komponen Penilaian

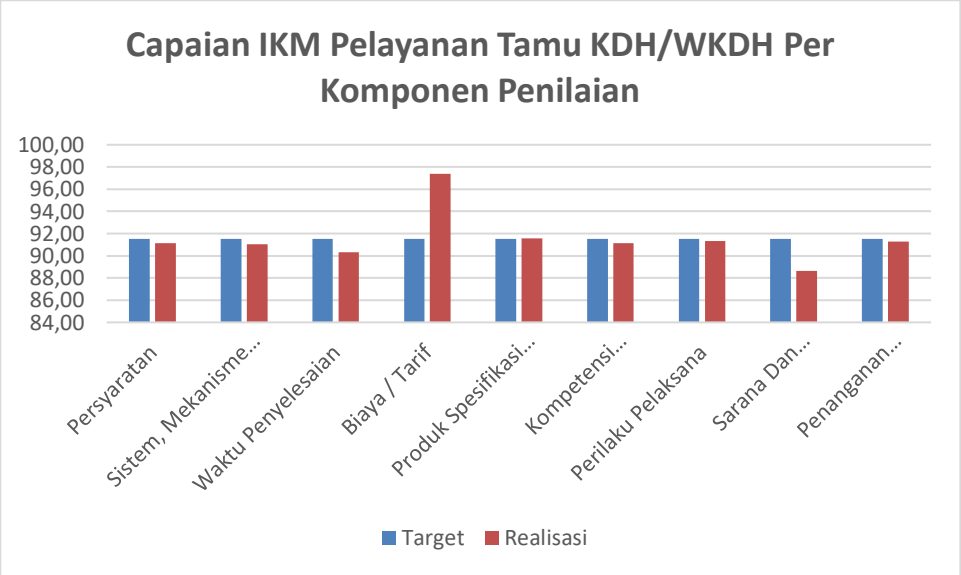

Sumber : Data Olahan Biro Umum tahun 2024

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun ini meningkat dari 91,52 menjadi 91,54 atau meningkat 0,02 point. Perkembangan nilai IKM Pelayanan Tamu KDH/WKDH pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel 3.3.1.7

Target dan Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024

Sasaran / Indikator	Target				Realisasi				Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
IKM Pelayan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,31	88,50	88,70	88,90	89,90	89,38	91,52	91,54	101,80%	100,99%	103,18%	102,97%

Grafik 6

Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Meskipun secara keseluruhan nilai tingkat kepuasan pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen seperti persyaratan dari nilai 93,52 tahun 2023 menjadi 91,13 tahun 2024 atau turun sebesar 2,39 point. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengolahan data questioner yang telah dilaksanakan. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan kepuasan pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tahun 2021 – 2024

Tabel 3.3.1.7

Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024 per Komponen

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1.	Persyaratan	93,41	93,41	93,52	91,13
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,43	90,43	90,38	91,05
3.	Waktu Penyelesaian	87,85	87,85	86,16	90,33
4.	Biaya / Tarif	99,00	99,00	99,00	97,39
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,47	90,47	90,53	91,56
6.	Kompetensi Pelaksana	85,00	85,00	82,61	91,13
7.	Perilaku Pelaksana	88,65	88,65	88,05	91,34
8.	Sarana Dan Prasarana	83,93	83,93	84,35	88,62
9.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	90,39	90,39	89,79	91,27

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya kualitas pelayanan public melalui indicator IKM Pelayanan Publik Biro Umum, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.1.8

Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,90	91,54	102,97	90,40	101,26
Nilai Rata-rata			**88,90**	**91,54**	**102,97**	**90,40**	**101,26**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Capaian Tingkat Kepuasan Tamu KDH/WKDH tahun 2024 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 102,97. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Tingkat Kepuasan Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH telah tercapai sebesar 101,26. Hal ini berarti Biro Umum hanya membutuhkan menjaga kualitas pelayanan dan terus ditingkatkan agar nanti tidak turun capaiannya di tahun berikutnya.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan pelayanan public pada Biro Umum Provinsi Jambi, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada diatas provinsi tersebut dimana Biro Umum Provinsi Provinsi Jambi mencapai 90,57 sebagaimana yang tergambar pada table dan grafik berikut :

TABEL 3.3.1.9

Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH dengan Standar Provinsi Lain

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Keterangan
		Sumbar	Jambi	Sumbar	Jambi	
1.	• IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH (Sumbar)	**91,53**		**91,54**		**Pada indicator ini menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan**

	• Persentase Peningkatan Pelayanan Tamu Pemerintah (Jambi)		**100**		**90,57**	**Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Grafik 7

Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH dengan Standar Provinsi Lain

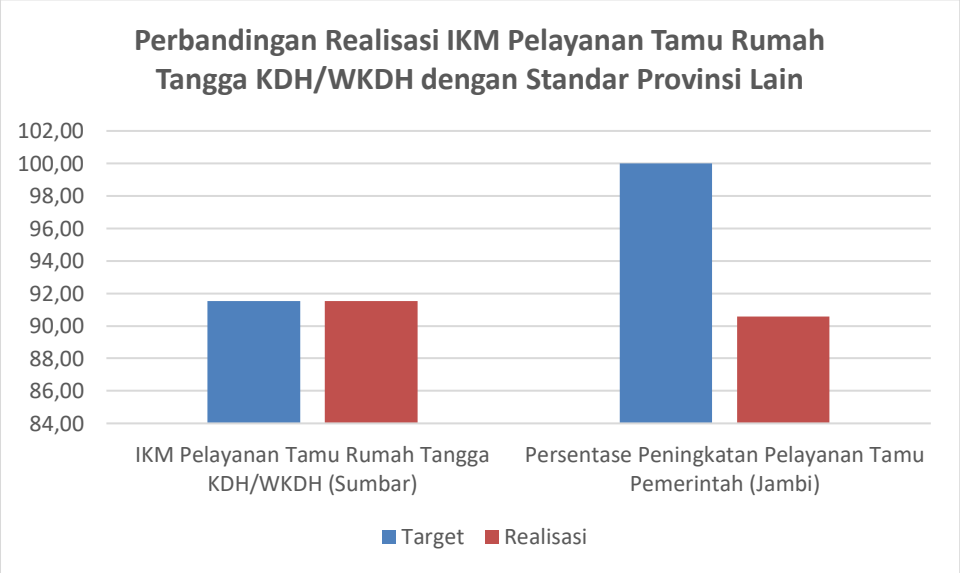

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan. Dalam Upaya pencapaian indicator kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2024, diantaranya :

1) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 97,39 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 91,53 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah biaya

yang dibutuhkan adalah gratis dan kalaupun ada biaya biasanya digunakan untuk peminjaman fasilitas yang sesuai aturannya dikenakan tarif retribusi.

2) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap Produk Pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH sangat jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,56 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 91,53 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah produk dan spesifikasinya jelas tertera dalam SOP pelayanan biro umum, baik itu yang gratis maupun yang membutuhkan biaya retribusi.

Disamping Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator nilai IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH pada Biro Umum, juga terdapat beberapa **Faktor yang Menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,62 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 91,52 “Sangat Baik”. Salah satu sarana dan prasarana yang masih menjadi titik lemah adalah fasilitas internet terutama pada unit pelayanan Biro Umum di Istana Bung Hatta Bukittinggi.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Biro Umum perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diiantaranya :

1) Melakukan recruitment tenaga kontrak pramusaji yang akan menjadi pelayanan tamu KDH/WKDH
2) Melaksanakan dan mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan tamu KDH/WKDH dalam Bimtek terkait.
3) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 80 ASN dan Non ASN Pelayanan Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai tata cara pelayanan	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional dan koordinator yaitu hanya sebanyak 25 orang atau 31,25% dari total ASN dan non ASN petugas pelayanan	• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan • Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

2. Sarana dan prasarana yang memadai

   Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan pelayanan masih sedikit memiliki permasalahan terutama fasilitas internet yang cepat.

3. Ketersediaan anggaran yang efektif

   Dalam rangka pencapaian keberhasilan indicator kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH terealisasi pada tahun 2024 sebesar 91,54% dari 91,53% dengan tingkat capaian sebesar 100,01% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.18.557.144.675 dan telah terealisasi sebesar Rp.17.867.849.357 atau sebesar 96,29%. Anggaran ini tersebar pada 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ; dan 2) Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah ; dan 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indicator kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{PA x CK}) - RA}{(\text{PA})} x\ 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp. 18.557.144.675

CK : Capaian Kinerja (%) = 100,01%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 17.867.849.357

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(Rp.\ 18.557.144.675\ x\ 100{,}01\%) - 17.867.849.357}{(\text{Rp.}\ 18.557.144.675)} x\ 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0{,}04\%$$

Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%) = NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{0{,}04\%}{20} x\ 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 59{,}31\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum dengan anggaran Rp.18.557.144.675 dan realisasi sebesar Rp.17.867.849.357 dengan capaian kinerja 100,01% mampu mendapatkan nilai efisiensi sebesar 59,31%. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah:

a) Dalam pengumpulan data questioner, terutama untuk unit pelayanan tamu di Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu questioner dikirim softcopynya ke unit kerja tersebut, dan pengumpulan datanya disampaikan melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas.

b) Sarana dan prasarana pada unit kerja pelayanan yang masih dalam kategori rusak ringan hingga sedang dilakukan pemeliharaan, sehingga terdapat efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana.

c) Sarana dan prasarana untuk jaringan internet pada Istana Bung Hatta mulai tahun 2024 menggunakan jaringan dari Diskominfotik sehingga terdapat efisiensi anggaran tagihan internet.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH :

Tabel 3.3.1.10

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	**IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH**					
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		**18.557.144.675**	**17.867.849.357**	**96,29%**
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**14.691.087.241**	**13.910.453.591**	**94,69%**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.982.000	190.765.793	82,59%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.827.566.141	1.661.209.492	90,90%
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**16.498.596.534**	**16.015.874.072**	**97,07%**
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.997.039.494	8.727.724.192	97,01%
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7.501.557.040	7.288.149.880	97,16%

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Indikator Kinerja 1.1.2	IKM Pelayanan Pimpinan

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja adalah IKM Pelayanan Pimpinan Biro Umum ditargetkan 90,15 pada tahun 2024. Penetapan target ini berpedoman dari realisasi Tingkat kualitas pelayanan public tahun sebelumnya

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Pengukuran indicator IKM Pelayanan Pimpinan dihitung berdasarkan data olahan questioner yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indicator yang telah ditetapkan Biro Umum memperoleh nilai sebesar 90,18 dari target 90,15 atau dengan capaian 100,03%, seperti yang tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.3.1.11

Capaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Pimpinan

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (90,15)	Sangat Baik (90,18)	100,03	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Nilai IKM didapat dari penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan pimpinan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Biro Umum memperoleh nilai komponen tertinggi yaitu pelayanan dilakukan secara gratis atau sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 99,00 dari target 90,15 dan nilai komponen terendah yaitu kompetensi pelaksana 86,04 dari target 90,15. Berikut rincian hasil pengolahan questioner IKM pelayanan pimpinan biro umum tahun 2024 :

Grafik 8

Capaian IKM Pelayanan Pimpinan Per Komponen Penilaian

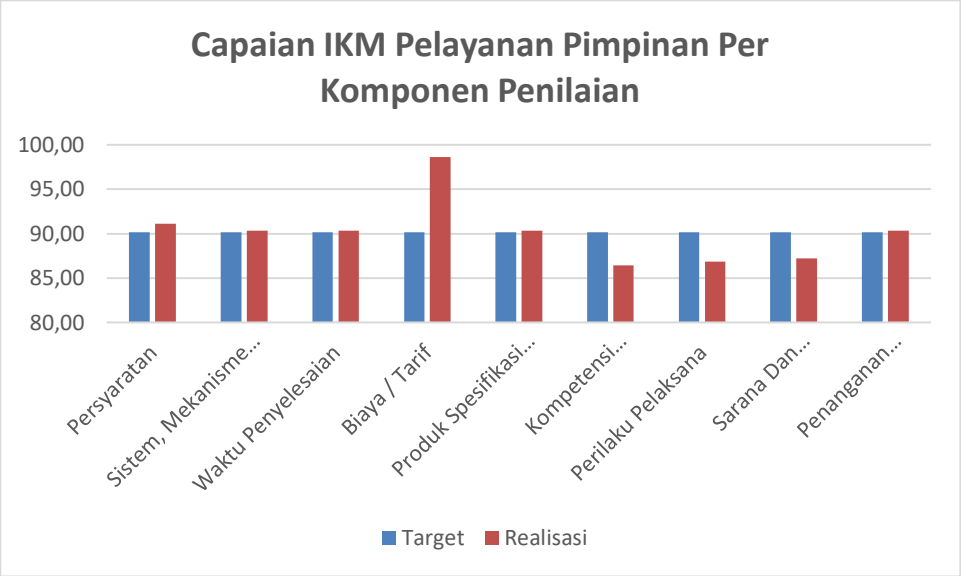

Sumber : Data Olahan Biro Umum tahun 2024

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun ini meningkat dari 90,14 menjadi 90,18 atau meningkat 0,04 point. Perkembangan nilai IKM Pelayanan Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel 3.3.1.11

Target Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024

Sasaran / Indikator	Target				Realisasi				Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
IKM Pelayan Pimpinan	88,31	88,50	88,70	88,90	88,39	89,18	90,14	90,18	100,09%	100,77%	101,62%	101,44%

Grafik 9

Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024

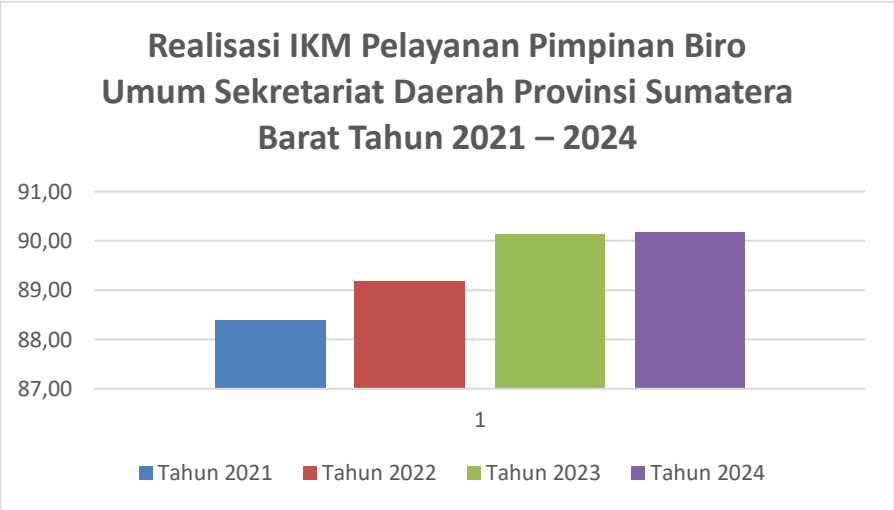

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Meskipun secara keseluruhan nilai tingkat kepuasan pelayanan pimpinan meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen seperti Kompetensi Pelaksana dari nilai 88,00 tahun 2023 menjadi 86,43 tahun 2024 atau turun sebesar 1,57 point. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengolahan data questioner yang telah dilaksanakan. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan kepuasan pelayanan pimpinan sekretariat daerah tahun 2021 – 2024

Tabel 3.3.1.12

Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024 per Komponen

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1.	Persyaratan	91,93	91,93	90,36	91,14
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	88,39	88,39	89,96	90,36
3.	Waktu Penyelesaian	88,39	88,39	89,57	90,36

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
4.	Biaya / Tarif	99,00	99,00	99,00	98,61
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,46	95,46	88,79	90,36
6.	Kompetensi Pelaksana	95,46	95,46	88,00	86,43
7.	Perilaku Pelaksana	88,39	88,39	88,00	86,82
8.	Sarana Dan Prasarana	53,04	60,11	86,04	87,21
9.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	95,46	95,46	91,54	90,36

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya kualitas pelayanan public melalui indicator IKM Pelayanan Publik Biro Umum, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.1.13

Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Pimpinan dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahu4 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Pimpinan	88,90	90,18	101,44	90,40	99,76

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahu4 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Nilai Rata-rata			88,90	90,18	101,44	90,40	99,76

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Capaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan tahun 2023 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 101,44. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Tingkat Kepuasan Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH telah tercapai sebesar 99,76. Hal ini berarti Biro Umum perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar nanti mampu mencapai target di akhir periode renstra.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan pelayanan public pada Biro Umum Provinsi Jawa Barat, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada dibawah provinsi tersebut dimana Biro Umum Provinsi Jawa Barat mencapai 93,22 sebagaimana yang tergambar pada table dan grafik berikut :

TABEL 3.3.1.14

Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan dengan Standar Provinsi Lain

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Keterangan
		Sumbar	Jawa Barat	Sumbar	Jawa Barat	
1.	• IKM Pelayanan Pimpinan (Sumbar) • Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan (Jawa Barat)	**90,15**	**80**	**90,18**	**93,22**	**Pada indicator ini menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Grafik 10

Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan dengan Standar Provinsi Lain

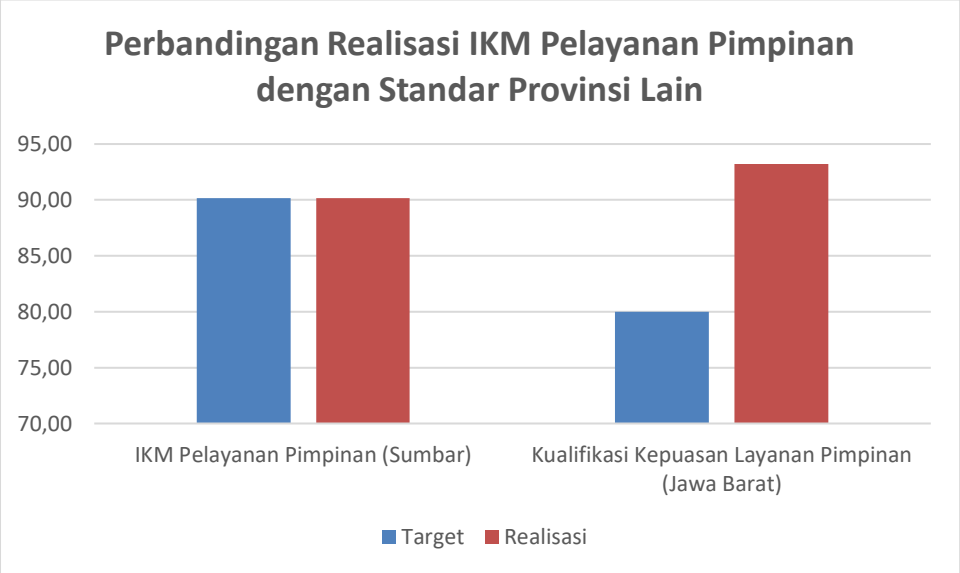

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan. Dalam Upaya pencapaian indicator kinerja IKM Pelayanan Pimpinan, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2024, diantaranya :

1) Persyaratan : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendapat pelayanan Pimpinan tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,14 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 90,15 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah karena persyaratan yang diminta biro umum relative mudah dan tertuang dalam SOP Pelayanan Pimpinan
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,36 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu

90,15 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah SOP yang tersosialisasi dengan baik dan mudah dimengerti.

3) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap waktu penyelesaian cepat dan tidak berbelit karena sesuai dengan SOP yang ada, hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,36 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 90,15 “Sangat Baik”
4) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan pimpinan adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 98,61 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 90,15 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah biaya yang dibutuhkan adalah gratis.
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap Produk Pelayanan pimpinan sangat jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,36 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 90,15 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah produk dan spesifikasinya jelas tertera dalam SOP pelayanan biro umum.
6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap setiap pengaduan, saran dan masukan dalam hal pelayanan pimpinan cepat ditanggapi hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,36 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 90,15 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah adanya pelaksana yang selalu stand by dalam menampung saran dan masukan dari stakeholders.

Disamping Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator nilai IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH pada Biro Umum, juga terdapat beberapa **Faktor yang Menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1) Kompetensi Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana dalam melaksanakan pelayanan pimpinan masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini

mendapat nilai 86,43 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 90,15 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan kegagalan dari unsur ini adalah karena kurangnya kemauan belajar dari pelaksana yang melayani pimpinan ditambah tidak adanya bimtek yang relevan untuk diikuti oleh pelaksana pelayanan.

2) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap perilaku pelaksana dalam melaksanakan pelayanan pimpinan masih sedikit kurang baik hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 86,82 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 90,15 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan kegagalan dari unsur ini adalah karena kurangnya kemauan belajar dari pelaksana yang melayani pimpinan ditambah tidak adanya bimtek yang relevan untuk diikuti oleh pelaksana pelayanan.
3) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Pimpinan masih sangat kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 87,21 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 90,15 “Sangat Baik”.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Biro Umum perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diiantaranya :

1) mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan dalam Bimtek terkait. Namun jika tidak ada instansi yang melaksanakan maka diusahakan untuk melaksanakan bimtek sendiri guna meningkatkan kompetensi dan perilaku pelaksana.
2) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Pimpinan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 40 ASN dan Non ASN Pelayanan Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai tata cara pelayanan	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional dan koordinator yaitu hanya sebanyak 27 orang atau 67,50% dari total ASN dan non ASN petugas pelayanan	• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan • Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

2. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan indicator kinerja IKM Pelayanan Pimpinan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 90,18 dari 90,15 dengan tingkat capaian sebesar 100,03% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.60.637.150.369 dan telah terealisasi sebesar Rp.57.726.689.875 atau sebesar 95,20%. Anggaran ini tersebar pada 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ; 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ; dan 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1) Pengadaan Mebel ; dan 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 2)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; dan 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu : 1) Pemeliharaan Mebel ; 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ; 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ; dan 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 2) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; dan 3) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
f. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indicator kinerja IKM Pimpinan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{PA x CK}) - RA}{(\text{PA})} x\ 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp.60.637.150.369
CK : Capaian Kinerja (%) = 100,03%
RA : Realisasi Anggaran = Rp.57.726.689.875

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(Rp.\,60.637.150.369\ x\ 100{,}03\%) - 57.726.689.875}{(\text{Rp.}\,57.726.689.875)} x\ 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0{,}05\%$$

Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%) = NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{0{,}05\%}{20} x\ 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 62{,}07\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum dengan anggaran Rp.60.637.150.369 dan realisasi sebesar Rp.57.726.689.875 dengan capaian kinerja 100,03% mampu mendapatkan nilai efisiensi sebesar 62,07%. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah:

a) Dalam pengumpulan data questioner, pengumpulan datanya disampaikan melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas.
b) Sarana dan prasarana pada unit kerja pelayanan yang masih dalam kategori rusak ringan hingga sedang dilakukan pemeliharaan, sehingga terdapat efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis IKM Pelayanan Pimpinan :

Tabel 3.3.1.15

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Pimpinan

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	**IKM Pelayanan Pimpinan**					
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		**60.637.150.369**	**57.726.689.875**	**95,20%**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**5.461.571.563**	**5.354.685.866**	**98,04%**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.133.800	94.133.800	100,00%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	685.796.900	678.307.150	98,91%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.066.880.270	1.052.513.340	98,65%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.058.000	33.699.256	67,32%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.564.702.593	3.496.032.320	98,07%

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**15.175.449.571**	**14.327.367.623**	**94,41%**
			Pengadaan Mebel	2.330.518.436	2.165.174.300	92,91%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.844.931.135	12.162.193.323	94,68%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**19.871.459.008**	**18.623.416.584**	**93,72%**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.269.500	50.256.200	89,31%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.442.027.960	3.916.954.288	88,18%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.450.687.000	1.386.323.470	95,56%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.922.474.548	13.269.882.626	95,31%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12.632.539.100**	**12.058.478.306**	**95,46%**
			Pemeliharaan Mebel	39.375.000	29.500.000	74,92%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.191.799	165.890.705	81,64%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.950.842.301	11.505.533.921	96,27%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	439.130.000	357.553.680	81,42%
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**4.380.691.955**	**4.294.085.429**	**98,02%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	252.244.496	245.637.970	97,38%
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000	-	0,00%
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.048.447.459	4.048.447.459	100,00%
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**3.115.439.172**	**3.068.656.067**	**98,50%**
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.115.439.172	3.068.656.067	98,50%

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Indikator Kinerja 1.1.3	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja adalah IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda Biro Umum ditargetkan 89,75 pada tahun 2024. Penetapan target ini berpedoman dari realisasi Tingkat kualitas pelayanan public tahun sebelumnya

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Pengukuran indicator IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda dihitung berdasarkan data olahan questioner yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indicator yang telah ditetapkan Biro Umum memperoleh nilai sebesar 90,01 dari target 89,75 atau dengan capaian 100,29%, seperti yang tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.3.1.16

Capaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (89,75)	Sangat Baik (90,01)	100,29	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Nilai IKM didapat dari penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan setda ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Biro Umum memperoleh nilai komponen tertinggi yaitu pelayanan dilakukan secara gratis atau sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 98,90 dari target 90,15 dan nilai komponen terendah yaitu kompetensi pelaksana 86,04 dari target 89,75. Berikut rincian hasil pengolahan questioner IKM pelayanan administrasi keuangan setda biro umum tahun 2024 :

Grafik 11

Capaian IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda Per Komponen Penilaian

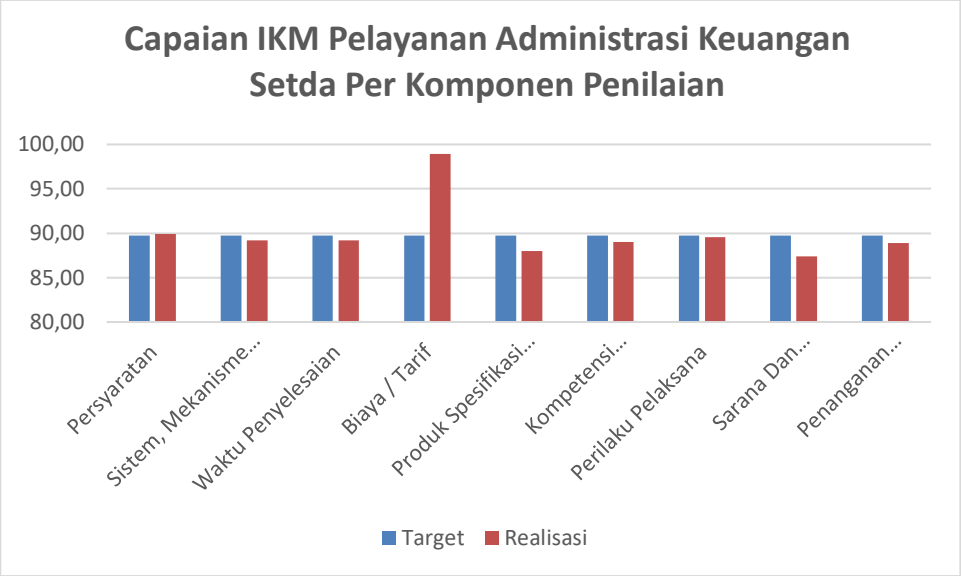

Sumber : Data Olahan Biro Umum tahun 2024

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun ini meningkat dari 89,75 menjadi 90,01 atau meningkat 0,26 point. Perkembangan nilai IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel 3.3.1.17

Target dan Realisasi IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024

Sasaran / Indikator	Target				Realisasi				Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,31	88,50	88,70	88,90	87,90	89,02	89,75	90,01	99,54%	100,59%	101,18%	101,25%

Grafik 12

Realisasi IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024

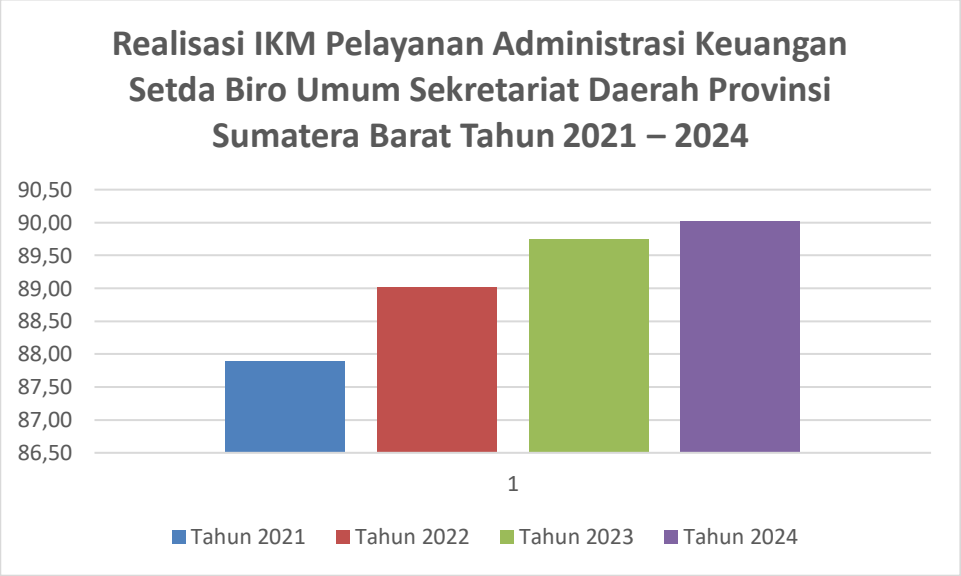

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Meskipun secara keseluruhan nilai tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan setda meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen seperti Penanganan Pengaduan, Sarana Dan Masukan dari nilai 89,63 tahun 2023 menjadi 88,92 tahun 2024 atau turun sebesar 0,71 point. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengolahan data questioner yang telah dilaksanakan. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan kepuasan pelayanan administrasi keuangan setda sekretariat daerah tahun 2021 – 2024

Tabel 3.3.1.17

Realisasi IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024 per Komponen

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1.	Persyaratan	97,17	97,17	89,02	89,94
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	82,50	83,42	88,20	89,22

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
3.	Waktu Penyelesaian	80,67	81,58	88,20	89,22
4.	Biaya / Tarif	99,00	99,00	98,90	98,90
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	83,42	84,33	88,20	88,00
6.	Kompetensi Pelaksana	98,08	98,08	88,92	89,02
7.	Perilaku Pelaksana	96,25	96,25	89,43	89,53
8.	Sarana Dan Prasarana	66,92	73,33	87,29	87,39
9.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	87,08	88,00	89,63	88,92

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya kualitas pelayanan public melalui indicator IKM Pelayanan Publik Biro Umum, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.1.18

Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahu4 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,90	90,01	101,25	90,40	99,57
Nilai Rata-rata			88,90	90,01	101,25	90,40	99,57

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Capaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda tahun 2024 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 101,25. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda telah tercapai sebesar 99,57. Hal ini berarti Biro Umum perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar nanti mampu mencapai target di akhir periode renstra.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan pelayanan public pada Biro Umum Provinsi Jawa Barat, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada dibawah provinsi tersebut dimana Biro Umum Provinsi Jawa Barat mencapai 90,21 sebagaimana yang tergambar pada table dan grafik berikut :

TABEL 3.3.1.19

Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda dengan Standar Provinsi Lain

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Keterangan
		Sumbar	Jawa Barat	Sumbar	Jawa Barat	
1.	• IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda (Sumbar) • Kualifikasi Kepuasan Layanan Penatausahaan Keuangan Setda (Jawa Barat)	**89,75**	**80**	**90,01**	**90,21**	**Pada indicator ini menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Grafik 13

Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda dengan Standar Provinsi Lain

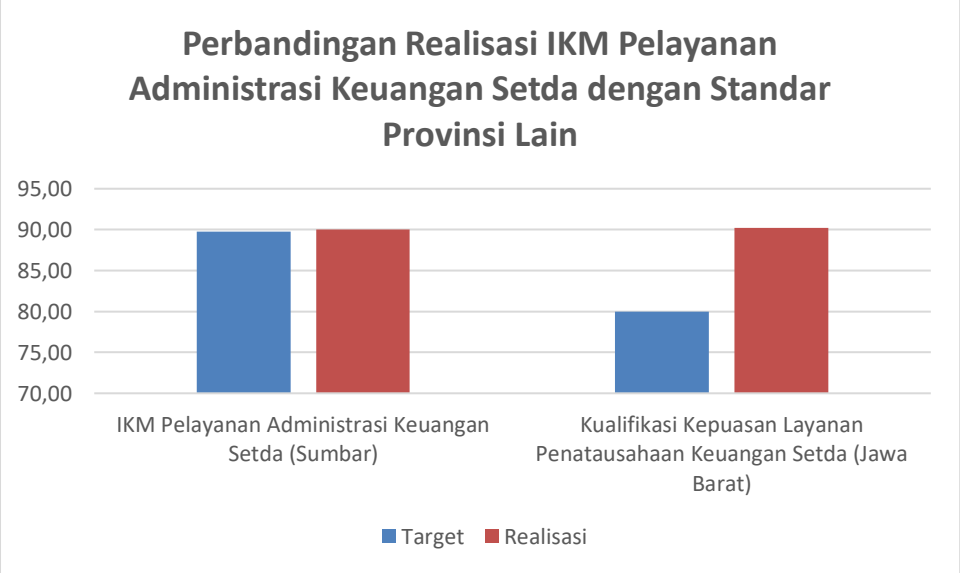

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan. Dalam Upaya pencapaian indicator kinerja IKM Pelayanan Pimpinan, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2024, diantaranya :

1) Persyaratan : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendapat pelayanan Pimpinan tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,94 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 89,75 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah karena persyaratan yang diminta biro umum relative mudah dan tertuang dalam SOP Pelayanan Administrasi Keuangan Setda
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,22 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 89,75 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah SOP yang tersosialisasi dengan baik dan mudah dimengerti.
3) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap waktu penyelesaian cepat dan tidak berbelit karena sesuai dengan SOP yang ada, hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,22 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 89,75 “Sangat Baik”
4) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan administrasi keuangan setda adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 98,90 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 89,75 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah biaya yang dibutuhkan adalah gratis.

Disamping Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator nilai IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH pada Biro Umum, juga terdapat beberapa **Faktor yang Menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1) Kompetensi Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana dalam melaksanakan pelayanan administrasi keuangan setda masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,02 dengan predikat “Sangat Baik”

dimana targetnya yaitu 89,75 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan kegagalan dari unsur ini adalah karena kurangnya kemauan belajar dari pelaksana yang melayani pengelola keuangan setda ditambah tidak adanya bimtek yang relevan untuk diikuti oleh pelaksana pelayanan.

2) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap perilaku pelaksana dalam melaksanakan pelayanan administrasi keuangan setda masih sedikit kurang baik hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,53 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 89,75 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan kegagalan dari unsur ini adalah karena kurangnya kemauan belajar dari pelaksana yang melayani pengelola keuangan setda ditambah tidak adanya bimtek yang relevan untuk diikuti oleh pelaksana pelayanan.
3) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasikan bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan administrasi keuangan setda masih sangat kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 87,39 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 89,75 “Sangat Baik”.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Biro Umum perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diiantaranya :

1) mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan dalam Bimtek terkait. Namun jika tidak ada instansi yang melaksanakan maka diusahakan untuk melaksanakan bimtek sendiri guna meningkatkan kompetensi dan perilaku pelaksana.
2) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Pimpinan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 40 ASN dan Non ASN Pelayanan Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai tata cara pelayanan	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional dan koordinator yaitu hanya sebanyak 27 orang atau 67,50% dari total ASN dan non ASN petugas pelayanan	• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan • Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

2. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan indicator kinerja IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda terealisasi pada tahun 2024 sebesar 90,01 dari 89,75 dengan tingkat capaian sebesar 100,29% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.58.888.757.104 dan telah terealisasi sebesar Rp.54.678.118.318 atau sebesar 92,85%. Anggaran ini tersebar pada 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ; 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ; dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indicator kinerja IKM Pimpinan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{PA x CK}) - RA}{(\text{PA})} x\ 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp.58.888.757.104

CK : Capaian Kinerja (%) = 100,29%

RA : Realisasi Anggaran = Rp.54.678.118.318

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(Rp.\ 58.888.757.104\ x\ 100{,}29\%) - 54.678.118.318}{(\text{Rp.}\ 58.888.757.104)} x\ 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0{,}07\%$$

Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%) = NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{0{,}07\%}{20} x\ 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 68{,}60\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum dengan anggaran Rp.58.888.757.104 dan realisasi sebesar Rp.54.678.118.318 dengan capaian kinerja 100,29% mampu mendapatkan nilai efisiensi sebesar 68,60%. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah:

a) Sarana dan prasarana pada unit kerja pelayanan yang masih dalam kategori rusak ringan hingga sedang dilakukan pemeliharaan, sehingga terdapat efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda :

Tabel 3.3.1.20

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	**IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah**		**58.888.757.104**	**54.678.118.318**	**92,85%**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**58.888.757.104**	**54.678.118.318**	**92,85%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.226.493.604	54.035.792.976	92,80%

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		Daerah Provinsi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	564.839.500	558.774.300	98,93%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	97.424.000	83.551.042	85,76%

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

3. 3.2 Tujuan 2 : "*Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel*"

Tujuan ke-2 Renstra Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 20216 – 2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel diukur melalui 1 indikator kinerja tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indicator kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3.2.1

Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2024 Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	73,20	73,38	100,25	70,00	104.82

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

Dilihat dari realisasi indicator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan pertama telah dicapai dengan sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100,25%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, maka target tersebut telah tercapai sebesar 104,82%. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja adalah berpedoman kepada target renstra Biro Umum 2021 – 2026 dan realisasi tahun sebelumnya.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Pengukuran capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilakukan melalui 1 (satu) indicator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 700/53/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024 memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 73,38 dengan kategori BB dari target 73,20 atau dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,25%, nilai ini menunjukkan bahwa AKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, bekinerja baik dan memiliki system manajemen kinerja handal.

TABEL 3.3.2.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2.1

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Nilai Akuntabilitasi Kinerja Biro Umum	BB (73,20)	BB (73,38)	100,25	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja		**BB (73,20)**	**BB (73,38)**	**100,25**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu nilai perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Berdasarkan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat terhadap empat komponen tersebut, biro umum memperoleh nilai tertinggi pada komponen perencanaan kinerja 23,70 dari bobot 30,00 dan komponen terendah pelaporan kinerja 11,41 dari bobot 15. Berikut rincian komponen nilai akuntabilitas kinerja biro umum tahun penilaian 2024 :

Grafik 14

Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Provinsi Sumatera Barat

Per Komponen Tahun 2024

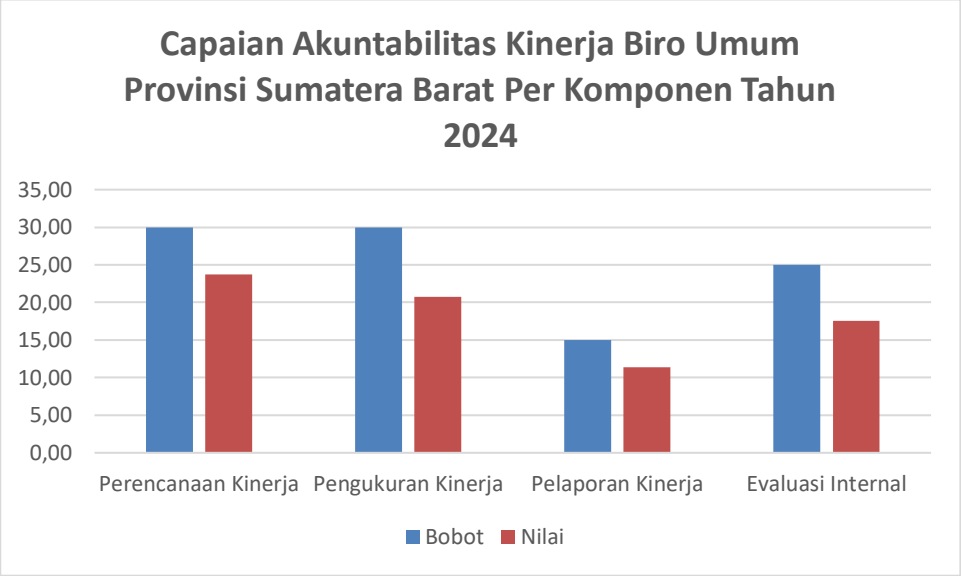

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Perbandingan dengan Realisasi Tahun sebelumnya. Dibanding dengan realisasi sebelumnya, realisasi tahun ini meningkat dari nilai 73,19 menjadi 73,38 atau meningkat 0,19 point. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Biro Umum selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel 3.3.2.2

Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum

selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024

Sasaran / Indikator	Target				Realisasi				Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2023	70	70	70	73,20	72,86	70,85	73,19	73,38	104,09%	101,21%	104,56%	100,25%

Grafik 15

Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Meskipun secara keseluruhan nilai evaluasi SAKIP meningkat dari tahun ke tahun, namun jika biro umum perlu terus melakuka perbaikan agar dapat terus memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021 – 2024

Tabel 3.3.2.3

Nilai Komponen Tingkat Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Tahun 2021 - 2024

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	25,06	24,66	26,89	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	17,00	16,60	19,66	20,73
3.	Pelaporan Kinerja	9,93	9,53	11,35	11,41
4.	Evaluasi Internal	6,46	6,06	15,29	17,54
5.	Pencapaian Kinerja	14,40	14,00		
Nilai Hasil Evaluasi		72,86	70,85	73,19	73,38
Kategori		**BB**	**BB**	**BB**	**BB**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indicator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.2.4

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70,00	73,38	104,83	70,00	104,83
Nilai Rata-rata			**70,00**	**73,38**	**104,83**	**70,00**	**104,83**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum tahun 2024 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 104,83. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra nilai akuntabilitas kinerja biro umum telah tercapai sebesar 104,83. Hal ini berarti Biro Umum hanya membutuhkan menjaga kualitas dokumen SAKIP dan meningkatnya agar dapat mencapi nilai dengan kategori A.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja pada Biro Umum Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada diatas provinsi Jambi yang hanya mencapai nilai 68,35 dan juga diatas Provinsi Riau yang hanya mencapai 71,22, sebagaimana yang tergambar pada grafik berikut :

Grafik 16

Perbandingan Realisasi dengan Standar Provinsi Lain

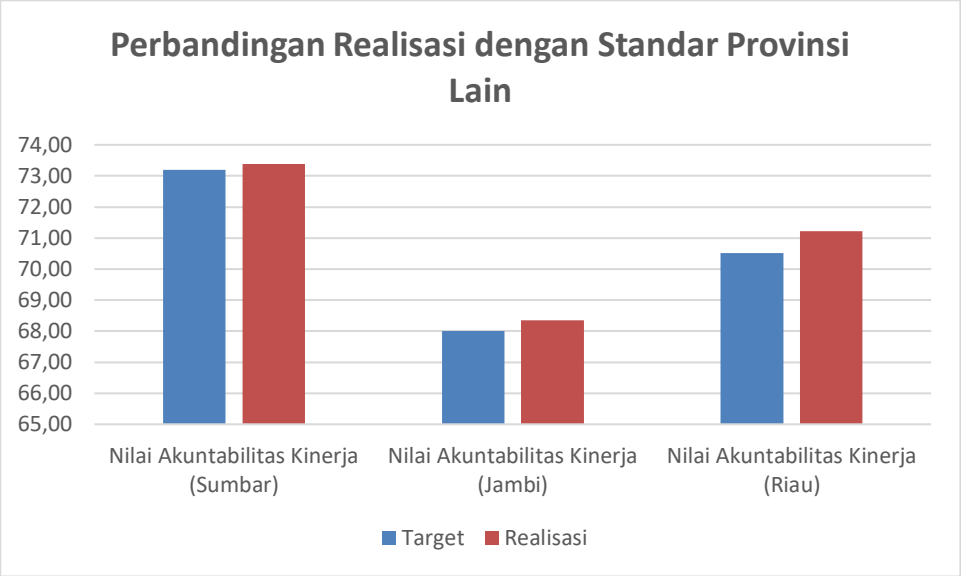

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indicator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum tahun 2024, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, diantaranya :

1) Perencanaan Kinerja

- Biro Umum sudah menyusun seluruh dokumen perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis, indicator kinerja utama, perjanjian kinerja, rencana aksi dan dokumen pelaksanaan anggaran dengan mempedomani pedoman teknis perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur sumatera barat nomor 71 tahun 2020 tentang pelaksanaan system akuntabililitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah provinsi Sumatera barat.
- Setiap unit / satuan kerja serta seluruh pegawai sudah menyusun perencanaan kinerja.

- Seluruh dokumen Perencanaan Kinerja sudah diformalkan dan dipublikasikan melalui website https://biroumum.sumbarprov.go.id ESR Menpan dan https://sakip.sumbarprov.go.id/
- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai.
- Indicator kinerja sudah memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevan, time bound* (SMART) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi / hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*).

2) Pengukuran Kinerja

- Biro Umum telah memiliki SOP terkait pengumpulan dan pengukuran kinerja, definisi operasional atas kinerja serta mekanisme yang jelas atas pengumpulan kinerja.
- Pimpinan sudah terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala melalui realisasi rencana aksisetiap triwulan.
- Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja eselon II telah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi https://sakip.sumbarprov.go.id/ dan https://dashboard.sumbarprov.go.id/

3) Pelaporan Kinerja

- Dokumen laporan kinerja telah disusun, telah diformalkan, telah direviu dan dipublikasikan serta disampaikan tepat waktu.

- Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan realisasi kinerja di level nasional.
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas tasa keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja beserta Upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalmencapai kinerja serta telah menginfokan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Biro Umum telah memiliki SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja juga terdapat beberapa **factor yang penghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (Achieavble), kurang menantang dan kurang realistis yaitu IKM pelayanan tamu Rumah tangga KDH/WKDH, IKM pelayanan pimpinan dan IKM pelayanan administrasi keuangan setda.
2) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang lebih baik.
3) Pemantauan rencana aksi secara berjenjang belum dilakukan. Hal ini terlihat dari bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Bagian, Sub Bagian sampai leveli individu belm disusun.
4) Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan

5) Capaian kinerja persentase realisasi penerimaan retribusi tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.
6) Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
7) Pemantauan kinerja belum dilakukan secara berkala dan berjenjang.
8) Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik strukturalmaupun fungsional.
9) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
10) Efisiensi atas penggunaan anggaran belum menggambarkan Tingkat efisiensi yang sebenarnya terjadi dalam mencapai sasaran, efisiensi yang dilaporkan baru sebatas sisa anggaran.
11) Setiap bagian/sub bagian/pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
12) Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
13) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
14) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi karena belum menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai dilingkungan Biro Umum.
15) Pemantauan capaian kinerja sudah menggunakan teknologi informasi namun belum sampai individu.
16) Pemantauan hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuian aktivitas belum dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk setiap bagain, rapat-rapat evaluasi internal lebih focus kepada pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran dan surat pertanggungjawaban / capaian realisasi fisik dan keuangan.
17) Hasil Evaluasi Akntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kienrja.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja tahun 2024, maka Biro Umum Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi LHE tahun 2024. Berikut matrik tindak lanjut LHE tahun 2024 :

TABEL 3.3.2.5

MATRIK TINDAK LANJUT PERENCANAAN KINERJA

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Melakukan perbaikan terhadap target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (Achievable), menantang dan realistis	Membuat Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Biro Umum Tahun 2024	1 Dokumen	Juni 2024	Kepala Biro Umum	Selesai
2.	Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Menjadikan target perencanaan sebagai tolok ukur tercapainya suatu kinerja	10 Laporan Realisasi Rencana Aksi	Maret - Desember 2024	Kepala Biro Umum	Selesai
3.	Melakukan Pemantauan Rencana Aksi setiap bulan yang dituangkdalam notulen rapat meliputi pembahasan target kinerja, pembahasan hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, rencana penyesuaian aktivitas untuk seluruh bagian	Membuat notulen rapat setiap pelaksanaan pemantauan rencana aksi	4 Notulen Rapat	April, Juli, Oktober 2024 dan Januari 2025	Kepala Bagian Tata Usaha	Selesai
4.	Melakukan Pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang, dengan mendokumentasikan bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Bagian, Sub Bagian sampai level individu	Membuat notulen rapat setiap pelaksanaan pemantauan rencana aksi masing-masing bagian	4 Notulen Rapat per Bagian	April, Juli, Oktober 2024 dan Januari 2025	Masing-masing Kepala Bagian	Selesai

Sumber : LHE Evaluasi AKIP Tahun 2024

TABEL 3.3.2.6

MATRIK TINDAK LANJUT PENGUKURAN KINERJA

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Menyusun dan memastikan data kinerja yang dikumpulkan relevan dengan kinerja yang dicapai	Melakukan monev rencana aksi Biro Umum, para Kabag, Kasubag, Pejabat Fungsional dan Pelaksana	10 Laporan Realisasi Rencana Aksi sampai level pelaksana	Maret - Desember 2024	Masing-masing Kepala Bagian	Selesai
2.	Menyusun strategi, kebijakan, kreativitas untuk mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya	Membuat langkah-langkah pencapaian rencana aksi yang tertuang dalam laporan realisasi rencana aksi	10 Laporan Realisasi Rencana Aksi sampai level pelaksana	Maret - Desember 2024	Masing-masing Kepala Bagian	Selesai
3.	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Melakukan mutasi internal sesuai capaian target kinerja masing-masing ASN	Surat Perintah Tugas (SPT) baru sesuai capaian kinerja ASN	Januari 2025	Kepala Biro Umum	Selesai
4.	Agar pengukuran kinerja sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran	Hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar penyesuaian strategi, aktivitas dan penganggaran dengan rencana aksi 1. Menyatukan anggaran ATK ke sub kegiatan logistik kantor 2. Menyatukan anggaran perjalanan dinas ke sub kegiatan rapat koordinasi kecuali kegiatan KDH/WKDH	DPA Tahun Anggaran 2025	Januari 2025	Kepala Biro Umum	Selesai
5.	Agar efisiensi atas penggunaan anggaran menggambarkan tingkat efisiensi yang sebenarnya terjadi	Dalam pengumpulan data realisasi kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti	10 Laporan Realisasi Rencana Aksi	Maret - Desember 2024	Masing-masing Kepala Bagian	Selesai

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
	dalam mencapai sasaran, efisiensi yang dilaporkan baru sebatas sisa anggaran	https://sakip.sumbarprov.go.id dan aplikasi whattapps	sampai level pelaksana			
6	Setiap bagian/sub bagian/pegawai sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kineraj	Meminta kepada masing-masing bagian/sub bagian/pegawai capaian kinerjanya beserta data dukungnya secara konsisten tiap bulannya	SKP masing-masing ASN tiap triwulan	April, Juli, Oktober 2024 dan Januari 2025	Masing-masing ASN	Selesai

Sumber : LHE Evaluasi AKIP Tahun 2024

TABEL 3.3.2.7

MATRIK TINDAK LANJUT PELAPORAN KINERJA

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Agar informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran dan belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Realisasi rencana aksi dijadikan dasar penyesuaian strategi, aktivitas dan penganggaran dengan rencana aksi 1. Menyatukan anggaran ATK ke sub kegiatan logistik kantor 2. Menyatukan anggaran perjalanan dinas ke sub kegiatan rapat koordinasi kecuali kegiatan KDH/WKDH	DPA Tahun Anggaran 2025	Januari 2025	Kepala Biro Umum	Selesai
2.	Agar informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Target-target pada Perjanjian Kinerja dan SKP bagi ASN dibuat berdasarkan realisasi di tahun sebelumnya kecuali ditetapkan	Dokumen PK dan SKP masing-masing ASN	Januari 2025	Masing-masing ASN	Selesai

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
		dengan peraturan yang lebih tinggi				
3.	Agar informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi	Membudayakan proses pencapaian target masing-masing ASN dengan dibuktikan adanya bukti dukungnya	Dokumen PK dan SKP masing-masing ASN	April, Juli, Oktober 2024 dan Januari 2025	Masing-masing ASN	Selesai
4.	Agar informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah	Seluruh ASN peduli dan komitmen terhadap pencapaian target kinerja individu maupun instansi	Dokumen Rencana Aksi Dokumen PK dan SKP masing-masing ASN	April, Juli, Oktober 2024 dan Januari 2025	Masing-masing ASN	Selesai

Sumber : LHE Evaluasi AKIP Tahun 2024

TABEL 3.3.3.8

MATRIK TINDAK LANJUT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Melakukan pemantauan kinerja internal secara berjenjang sampai ke level individu dan berkoordinasi dengan Biro Organisasi untuk pengembangan Teknologi Informasi / aplikasi e-sakip sampai level staf	Menyampaikan kepada Biro Organisasi terhadap kebutuhan pengembangan aplikasi e-sakip agar dapat memantau kinerja sampai level staf	Surat Usulan pengembangan aplikasi e-sakip	Juni 2024	Kepala Biro Umum	Selesai
2.	Melaksanakan pemantauan kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, meliputi pembahasan target kinerja secara berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas, strategi dan kebijakan dan dilakukan rutin setiap bulan yang	Membuat laporan realisasi rencana aksi setiap bulannya	10 Laporan Realisasi Rencana Aksi sampai level pelaksana	Maret - Desember 2024	Masing-masing Kepala Bagian	Selesai

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
	dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan					
3.	Menggunakan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja	Menjadikan tiap-tiap point rekomendasi catatan APIP sebagai dasar tindak lanjut akuntabilitas kinerja Biro Umum	Matrik tindak lanjut rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024	Juni 2024 - Januari 2025	Kepala Biro Umum	Selesai

Sumber : LHE Evaluasi AKIP Tahun 2024

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 62 ASN Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural, Fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian TU Biro (17 Orang) atau 27,42% dari total ASN Biro Umum	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bagian untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

2. Sarana dan prasarana yang memadai

   Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tupoksi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan indicator Nilai Akuntabilitas Kinerja terealisasi pada tahun 2024 sebesar 73,38% dari 73,20% dengan tingkat capaian sebesar 100,25% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.2.460.631.587 dan telah terealisasi sebesar Rp.2.381.344.314 atau sebesar 96,78%. Anggaran ini tersebar pada 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan 3) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; dan 2). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya ; dan 2). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Penyediaan Bahan Logistik Kantor ; 2). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan 3). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
e. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indicator kinerja IKM Pimpinan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{PA x CK}) - RA}{(\text{PA})} x\ 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp. 2.460.631.587

CK : Capaian Kinerja (%) = 100,25%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 2.381.344.314

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(Rp.\,2.460.631.587\ x\ 100{,}25\%) - 2.381.344.314}{(\text{Rp.}\,2.460.631.587)}\ x\ 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0{,}03\%$$

Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%) = NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{0{,}03\%}{20}\ x\ 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 58{,}68\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum dengan anggaran Rp.2.460.631.587 dan realisasi sebesar Rp.2.460.631.587 dengan capaian kinerja 100,25% mampu mendapatkan nilai efisiensi sebesar 58,68%. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah:

a) Acara Forum Perangkat Daerah Biro Umum yang awalnya direncanakan di Bukittinggi diubah tempat pelaksanaannya ke Auditorium Gubernuran sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.
b) Pengumpulan data realisasi kinerja untuk ASN tidak lagi dilakukan dengan monev langsung ke unit kerja cukup dengan menyampaikan data realisasi per bulannya melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung indicator kinerja nilai akuntablitas kinerja biro umum :

Tabel 3.3.2.9

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	**Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**					
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		**2.460.631.587**	**2.381.344.314**	**96,78%**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**158.478.100**	**151.395.550**	**95,53%**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.476.300	70.835.300	95,11%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.922.800	46.185.350	94,40%
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	35.079.000	34.374.900	97,99%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**549.473.318**	**537.383.964**	**97,80%**
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	444.747.149	439.851.811	98,90%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	104.726.169	97.532.153	93,13%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**489.412.587**	**457.400.400**	**93,46%**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	437.500.000	405.641.800	92,72%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.912.587	51.758.600	99,70%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**919.527.832**	**891.427.800**	**96,94%**
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	703.337.000	689.125.400	97,98%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.109.500	173.429.000	96,83%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.081.332	28.873.400	77,87%
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**343.739.750**	**343.736.600**	**100,00%**
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	343.739.750	343.736.600	100,00%

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

3. 3.3 Tujuan 3 : "*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*"

Tujuan ke-3 Renstra Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah diukur melalui 1 indikator kinerja tujuan yaitu Persentase Realisasi PAD. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indicator kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3.3.1

Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi PAD	95%	94,83%	99,82%	95%	99,82%

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

Dilihat dari realisasi indicator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan ketiga dapat dicapai dengan predikat sangat tinggi, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 99,82%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, maka target tersebut telah tercapai sebesar 99,82%. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 3.1	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja adalah berpedoman kepada target renstra Biro Umum 2021 – 2026 dan realisasi tahun sebelumnya serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evauasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Pengukuran capaian sasaran Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi dilakukan melalui 1 (satu) indicator kinerja yaitu % Realisasi Penerimaan Retribusi. Berdasarkan hasil realisasi anggaran tahun 2024, penerimaan retribusi dari Biro Umum mencapai 94,83% dari target 95% dalam kategori sangat tinggi sesuai dengan Permendagri RI Nomor 08 Tahun 2017.

TABEL 3.3.3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3.1

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	94,83%	99,82%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja		**95%**	**94,83%**	**99,82%**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

% Realisasi Penerimaan Retribusi diukur dengan realisasi pendapatan retribusi biro umum dibandingkan dengan target pendapatan yang dibebankan kepada Biro Umum.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun sebelumnya. Dibanding dengan realisasi sebelumnya, realisasi tahun ini naik dari nilai 70,00 menjadi 94,83 atau naik 24,83 point. Perkembangan % Realisasi Penerimaan Retribusi pada Biro Umum selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel 3.3.3.3

Target dan Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum

selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024

Sasaran / Indikator	Target				Realisasi				Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
% Realisasi Penerimaan Retribusi	95	95	95	95	204,2	111,35	70	94,83	214,95%	117,21%	73,68%	99,82%

Grafik 17

Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024

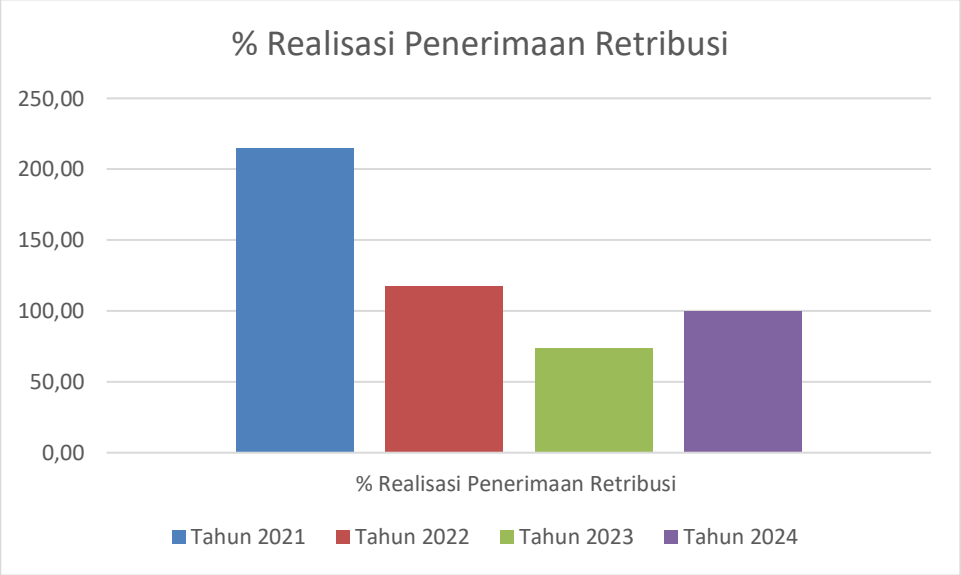

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

Meskipun secara keseluruhan % Realisasi Penerimaan Retribusi cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, namun ada faktor eksternal yang diluar kendali biro umum untuk mencapai target retribusi yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi melalui indicator % Realisasi Penerimaan Retribusi, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.3.3

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran % Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2024 dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	94,83%	99,82%	95%	94,83%
Nilai Rata-rata			**95%**	**94,83%**	**99,82%**	**95%**	**94,83%**

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Capaian % Realisasi Penerimaan Retribusi tahun 2024 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 94,83. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra % Realisasi Penerimaan Retribusi biro umum telah tercapai sebesar 94,83%. Hal ini berarti Biro Umum hanya membutuhkan peningkatan kinerja agar mampu mencapai target retribusi di akhir tahun renstra.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Sampai saat ini, kami belum menemukan data pembanding terhadap target retribusi Biro Umum oleh karena itu perbandingan realisasi dengan standar nasional atau dengan provinsi lain belum bisa ditampilkan.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indicator kinerja % Realisasi Penerimaan Retribusi Biro Umum tahun 2024, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, diantaranya karena sebagian besar dari adanya pemakaian OPD kabupaten/Kota atau pihak swasta.

Disamping Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan % Realisasi Penerimaan Retribusi Biro Umum tahun 2024, juga terdapat **factor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini karena

Capaian kinerja realisasi penerimaan retribusi Biro Umum mencapai 94,83% dari target 95%. Kegagalan mencapai ini disebabkan karena adanya penurunan pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini retribusi pemungutan pemakaian Istana Bung Hatta dan Mess Bukti Lampu. penurunan ini disebabkan karena penurunan OPD lingkup provinsi yang menggunakan Istana Bung Hatta dan Mess Bukti Lampu karena adanya rasionalisasi anggaran OPD dan acara-acara dialihkan pada ruang rapat kantor atau ruang kantor OPD lain yang bersifat gratis

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja tahun 2024, maka Biro Umum perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diantaranya :

a. Meningkatkan promosi pendapatan retribusi Biro Umum ke Kabupaten / Kota dan pihak swasta.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan peningkatan retribusi tersebut.
c. Mendorong OPD Provinsi yang memliki anggaran sewa gedung untuk melaksanakan acara di Istana Bung Hatta / Mess Bukit Lampu dibanding dengan acara di Hotel

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 104 ASN dan Non ASN Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai pelayanan dalam	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional, koordinator dan ASN pada Gedung tempat yang menjadi target	• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan • Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
pencapaian target retribusi	retribusi yaitu hanya sebanyak 47 orang atau 45,19% dari total ASN dan non ASN petugas pelayanan	

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

2. Sarana dan prasarana yang memadai

   Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tupoksi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan anggaran yang efektif

   Dalam rangka pencapaian keberhasilan indicator % Realisasi Penerimaan Retribusi Biro Umum tahun 2024 terealisasi pada tahun 2024 sebesar 94,83% dari 95% dengan tingkat capaian sebesar 99,82% didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran yang tersebar pada 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah.

   Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indicator kinerja IKM Pimpinan adalah sebagai berikut :

   $$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{PA x CK}) - RA}{(\text{PA})} x\ 100\%$$

   Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp.32.364.561

CK : Capaian Kinerja (%) = 99,82%

RA : Realisasi Anggaran = Rp.30.309.775

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(Rp.\,32.364.561\ x\ 99{,}82\%) - 30.309.775}{(\text{Rp.}\,30.309.775)} x\ 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0{,}06\%$$

Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%) = NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{0{,}06\%}{20} x\ 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 65{,}42\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum dengan anggaran Rp.32.364.561 dan realisasi sebesar Rp.30.309.775 dengan capaian kinerja 99,82% mampu mendapatkan nilai efisiensi sebesar 65,42%. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah:

a) Pengumpulan data realisasi pendapatan retribusi tidak lagi dilakukan dengan monev langsung ke unit kerja cukup dengan menyampaikan data realisasi per bulannya melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung indicator kinerja nilai akuntablitas kinerja biro umum :

Tabel 3.3.3.4

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	**Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi**	**% Realisasi Penerimaan Retribusi**					
			Program Penunjang Urusan Pemerintah		**32.364.561**	**30.309.775**	**93,65%**
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**32.364.561**	**30.309.775**	**93,65%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
			Daerah Provinsi	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	32.364.561	30.309.775	93,65%

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2024

3. 4 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 140.576.048.296,-. Anggaran tersebut tersebar di 1 program, 11 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Hingga triwulan IV Tahun 2024, dari pagu sebesar Rp.140.576.048.296 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.132.679.311.639 atau sebesar 94,38%. Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 18

Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Tahun 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 hampir mencapai target penyerapan setiap bulannya. Walaupun terlihat adanya gap antara target dan realisasi disetiap bulannya, hingga pada akhir triwulan di bulan Desember 2024 gap tersebut semakin kecil yaitu sebesar 5,62%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing bagian di lingkup Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi anggaran yang dibuat. Untuk memperbaiki keadaan ini, sangat dibutuhkan komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga mampu melakukan menyerapan anggaran dengan optimal mendekati target yang direncanakan.

Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja. Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1

Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu KDH/WKDH	91,53	91,54	100,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	140.576.048.296	132.679.311.639	94,38
		IKM Pelayanan Pimpinan	90,15	90,18	100,03				
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	89,75	90,01	100,29				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	73,20	73,38	100,25%				
3.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95,00%	94,83%	99,82%				
Rata-rata					100,08%				94,38%

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa :

1. Dengan penggunaan anggaran sebesar 94,38% yang berada pada 1 program dapat tercapai kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,08%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 3 (tiga) sasaran kinerja yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi.

Perbangingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2023, capaian realisasi anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 4,09%, dimana realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 98,47% dan ditahun 2024 sebesar 94,38% sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 19

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024

Walaupun terjadi penurunan persentase serapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum serapan anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tidak menemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Biro Umum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari 38 sub kegiatan hanya terdapat 9 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90%. Adapun sub kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, dari anggaran Rp.97.424.000 terealisasi Rp.83.551.042 dengan capaian 85,76%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah adanya penyampaian bahan untuk penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi whattaps sehingga terjadi penghematan perjalanan dinas dan BBM.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari anggarn Rp.50.058.000 terealisasi Rp.33.699.256 dengan capaian 67,32. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah karena

disesuaikan dengan permintaan Pimpinan (KDH, WKDH dan Sekda) terhadap buku bacaan.

3. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis, dari anggaran Rp.37.081.332 terealisasi Rp.28.873.400 dengan capaian 77,87% Adalah karena penatausahaan arsip dinamis di unit kerja Istana Bung Hatta yang seharusnya dilaksanakan tahun 2024 diundur menjadi awal tahun 2025 karena menyesuaikan dengan jadwal personel dari Dinas Arsip dan Pustaka.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari anggaran Rp.56.269.500 terealisasi Rp.50.256.200 dengan capaian 89,31%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah telah adanya aplikasi srikandi untuk efisiensi kegiatan surat menyurat.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari anggaran Rp.4.442.027.960 terealisasi Rp.3.916.954.288 dengan capaian 88,18%. Penyebab realisasi anggaran dibawah 90% adalah karena biaya penambahan daya tidak semahal yang diperkirakan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari anggaran Rp.230.982.000 terealisasi Rp.190.765.793 dengan capaian 82,59%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah karena disesuaikan dengan laporan kerusakan kendaraan jabatan KDH/WKDH dan Sekda.
7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dari anggaran Rp.39.375.000 terealisasi Rp29.500.000 dengan capaian 80,08%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 74,92% adalah karena disesuaikan dengan laporan kerusakan mebel.
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari anggaran Rp.203.191.799 terealisasi Rp.165.890.705 dengan capaian 81,64%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah disesuaikan dengan laporan kerusakan peralatan dan mesin lannya.
9. Sub Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari anggaran

Rp.439.130.000 terealisasi Rp.357.553.680 dengan capaian 81,42%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah disesuaikan dengan laporan kerusakan sarana dan prasarana Gedung kantor.

9 sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2024 terlihat realisasi keuangan mencapai 94,38% dan realisasi pada pencapaian sasaran strategis mencapai 100,08% atau tergolong dalam kriteria Sangat Baik.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2024, maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat.
3. Setiap Bagian adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda.
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.

BAB IV
Penutup

4.1. Kesimpulan

LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024 ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum diselenggarakan dalam rangka pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, yang dengan penuh tantangan tetap dapat terlaksana dengan cukup baik. Seluruh indikator kinerja Biro Umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan kecuali target pendapatan yang mencapai 94,83%.

Walaupun demikian, setiap pencapaian perlu dilakukan evaluasi, agar mendapat feedback guna perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, juga untuk mengetahui lebih dini terhadap hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, agar dibuatkan inisiatif strategis yang akan mengarahkan tercapainya target.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pimpinan maupun kepada seluruh pihak (stakeholders) yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum. Selain itu, diharapkan juga adanya feedback atau umpan balik agar hasil (outcomes) yang diharapkan dari setiap program dapat memberikan dampak yang baik bagi stakeholders Biro Umum.

Selain itu, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi.

4.2. Tindak Lanjut Kedepan

Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 diharapkan terus mengalami peningkatan. Dalam rangka menjaga dan mencapai target kinerja tahun 2025, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan beberapa strategi, diantaranya :

1. Memberikan pelatihan bimtek yang relevan bagi ASN dan Non ASN secara maksimal terkhusus yang berhubungan langsung dengan capaian kinerja Biro Umum.
2. Melaksanakan seluruh tindak lanjut dari Inspektorat atau BPK baik berupa audit, reviu dan sejenisnya terhadap pelaksanaan anggaran dan target kinerja Biro Umum
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
4. Mengembangkan inovasi pelayanan yang telah dibangun seperti Sipintas dan Sispensu.

Kepala Biro Umum,

Ir. Edi Dharma, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19680513 199403 1 014

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SKPD : BIRO UMUM

NO.		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu dan Pimpinan	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik
		IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik
2.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
3.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.576.048.296	
	Jumlah	**140.576.048.296**	

SEKRETARIS DAERAH

dto,

Drs. HANSASTRI, MM

KEPALA BIRO UMUM,

dto,

Ir. EDI DHARMA, M.Si

NIP. 19680513 199403 1 014

LAMPIRAN 2

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BIRO UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu dan Pimpinan	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (91,53)	Sangat Baik (91,54)	100,01	
		IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (90,15)	Sangat Baik (90,18)	100,03	
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (89,75)	Sangat Baik (90,01)	100,29	
2	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (73,20)	BB (73,38)	100,25	
3	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	94,83%	99,82	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.576.048.296	132.679.311.639	94,38
	Jumlah	**140.576.048.296**	**132.679.311.639**	**94,38**

KEPALA BIRO UMUM,

dto

Ir. EDI DHARMA, M.Si
NIP. 19680513 199403 1 014

BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa